

Laporan Tahunan 2023

2023 Annual Report

YAYASAN
TIFA



Merawat Arah Perubahan



Laporan Tahunan 2023

2023 Annual Report

Merawat Arah Perubahan

Change is inevitable, Growth is optional
- John C Maxwell.

Perubahan merupakan keniscayaan, sesuatu yang tidak terhindarkan, namun bertumbuh selayaknya merawat tanaman. Menyongsong tahun 2023 Tifa mengukuhkan masa transisi melalui kerja-kerja penguatan demokrasi dan masyarakat sipil menuju masyarakat yang adil dan setara.

Tahun 2023 menjadi bagian dari perjalanan Tifa “baru” untuk melaju ke arah perubahan. Semenjak bukan lagi menjadi bagian dari jaringan Open Society Foundations, Tifa bekerja dalam dua arah. *Pertama, intermediary organization* yang memposisikan Tifa sebagai katalisator pendanaan serta pengampu diskusi multi *stakeholder* yang menghubungkan gerakan masyarakat sipil Indonesia. Kedua, *implementing organization*, Tifa sebagai pengampu program yang menjalankan visi misi organisasi. Dua arah pendekatan ini menjadikan Tifa lebih luwes dalam membangun pelibatan yang konstruktif, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Dalam perjalanan transisi, Tifa terus mengupayakan kemandirian lembaga, di antaranya diwujudkan melalui diversifikasi pendanaan dan kerja sama. Selain itu Tifa juga berupaya untuk lebih adaptif dan selalu responsif melihat pelbagai isu kritis yang tengah menjadi persoalan dan tantangan eksternal. Tifa melihat persoalan secara interseksional, sehingga persoalan demokrasi tidak hanya meliputi transparansi, akuntabilitas dan kelompok rentan, namun juga meluas pada ekosistem data digital, keadilan transisional, dan manajemen sumber daya alam.

Tifa menyadari saat ini bekerja di tengah situasi penurunan kualitas demokrasi dan penyusutan ruang sipil, serta bangkitnya otoritarianisme. Kerentanan demokrasi Indonesia berhimpitan dengan momentum politik, pemilu dan pilkada. Publik merasa khawatir

jika pemilu akan memicu kembali munculnya polarisasi dan pelbagai hoax yang memperparah situasi demokrasi. Tifa merespon situasi ini dengan merancang pelbagai intervensi bersama mitra untuk mengawal pemilu. Maka jika dilihat berbagai program yang dilaksanakan Tifa bersama mitra pada tahun 2023 adalah upaya untuk mengurai persoalan kemunduran demokrasi dan penyempitan ruang sipil di Indonesia, khususnya pada masa transisi kekuasaan nasional. Dalam menjalankan intervensinya, Tifa tentunya tetap berpatokan dengan tiga matra utama, yakni Hak Asasi Manusia, Tata Kelola Sumber Daya Alam, dan Tata Kelola Digital.

Tahun 2023 merupakan momentum memantapkan kembali masa transisi kelembagaan dan penguatan internal. Manajemen senantiasa memastikan pertumbuhan organisasi dan arah perubahan tetap di lajur nilai, visi serta misi Tifa. Di samping itu, dengan adanya momentum politik pemilu, Tifa juga terus berkontribusi dalam masa transisi kepemimpinan nasional. Keduanya saling terkait dan penting untuk memastikan transisi tetap pada arah perubahan. Harapannya laju perubahan menjadi katalisator penguatan organisasi, namun juga merawat demokrasi, dan terus menerus memberi dampak.



Daftar Isi

Pendahuluan — 2

| | |
|---|-----------------------------|
| 2 | Editorial |
| 3 | Daftar Isi |
| 4 | Sambutan Direktur Eksekutif |
| 5 | Pesan Dewan Pengurus |

Profil Organisasi — 6

| | |
|----|-------------------------------|
| 8 | Tentang Yayasan Tifa |
| 9 | Struktur dan Kepemimpinan |
| 10 | Dewan Pengurus |
| 12 | Struktur Organisasi |
| 13 | Strategi Implementasi Program |
| 14 | Highlight |

Cerita Perubahan — 16

| | |
|----|--------------------------------|
| 18 | Jurnalisme Aman |
| 21 | Keadilan Transisional |
| 23 | DBH-SDA |
| 26 | Review Program |
| 28 | Demokrasi Digital |
| 31 | Pelindungan Data Pribadi |
| 33 | Hibah Open Society Foundations |

Epilog — 36

Etalase Pengetahuan 38

Laporan Keuangan — 40

| | |
|----|------------------|
| 42 | Laporan Keuangan |
|----|------------------|

Sambutan Direktur Eksekutif



Oslan Purba

Direktur Eksekutif Yayasan Tifa

Mewujudkan masyarakat terbuka yang demokratis dan berkeadilan adalah bagian dari mimpi Yayasan Tifa yang sekaligus menjadi pendorong bagi kami untuk terus memberikan manfaat kepada masyarakat sipil di Indonesia.

Tifa terus bekerja meski sedang menyesuaikan diri dengan proses transformasi untuk menjadi organisasi yang lebih mandiri di tengah ekosistem pendanaan bagi organisasi masyarakat sipil yang semakin menyempit. Terlebih tantangan ke depan terasa lebih dinamis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya hasil pemilu 2024 yang belum mampu menghadirkan kelompok oposisi yang kuat, pengaruh geopolitik dimana perang yang masih berlangsung di Ukraina, Timur Tengah dan semakin meningkatnya ketegangan politik di Asia-Pasifik, serta ditambah lagi dengan ancaman krisis ekonomi, iklim, energi dan pangan, sehingga kami tidak hanya harus jeli menghadirkan peluang namun juga terjaga.

Di tahun 2023, Yayasan Tifa terus berkomitmen sebagai penyokong masyarakat terbuka dengan memperkuat kemitraan strategis di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Proses penguatan ini mencakup kolaborasi konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan. Tifa terus berupaya untuk menjadi katalisator pendanaan

bagi organisasi masyarakat sipil sesuai perannya sebagai *intermediary*. Inisiatif program dijalankan melalui mekanisme *grantmaking* dan implementasi langsung, menyoroti penguatan masyarakat sipil, transparansi pemerintah, dan akses keadilan dengan tujuan melindungi hak asasi kelompok rentan serta mengadvokasi pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2023, dalam kaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, Tifa dapat memerankan peran sebagai *hub*, inisiator diskusi multi-kepentingan, juga memberikan program pengembangan kapasitas. Kami juga secara konsisten menanggapi isu krusial yang terkait dengan keterbukaan atau dalam rangka menciptakan masyarakat yang terbuka seperti transparansi dan akuntabilitas pemerintah, ekosistem data digital yang demokratis dan sehat terutama perlindungan data pribadi, penguatan demokrasi melalui reformasi sektor keamanan dan keadilan transisional, pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di tengah ancaman krisis iklim serta pemenuhan hak asasi manusia terutama untuk kelompok marginal dan rentan.

”

Beragam tantangan dihadapi pada tahun 2023, namun terdapat juga berbagai keberhasilan yang dicapai untuk disyukuri dan terus diberdayakan atau dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadilan sosial dan lingkungan meski belum mampu diwujudkan secara maksimal, akan tetapi kesadaran kolektif untuk menghadirkan perubahan sudah mulai terbentuk ditandai dengan beragam konsolidasi masyarakat sipil yang sedang berlangsung. Dengan berlalunya 2023, kami menjalani waktu adaptasi ini dengan bersemangat meski ada waktunya jatuh-bangun juga. Namun secara bersama-sama, kami mampu memetakan arah perjalanannya sebagai lembaga yang lebih independen untuk tahun-tahun selanjutnya. (*)

Pesan Dewan Pengurus



Endy Bayuni

Ketua Dewan Pengurus Yayasan Tifa

Sejak perpisahan dengan Open Society Foundations pada tahun 2019, perjalanan Tifa menuju independensi dan keberlanjutan terus menjadi prioritas utama. Kami menyadari bahwa adaptasi bukanlah tugas yang mudah, namun kami berkomitmen untuk menghadapinya dengan tekad dan integritas yang tinggi.

Melalui perubahan struktural dan kultural yang mendalam, Tifa terus menyelami sebagai lembaga hibrida yang tidak hanya bertindak sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai pelaksana program dengan terus menggandeng mitra-mitra meski dengan dana yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya.

Keberhasilan transformasi ini juga tidak lepas dari kepercayaan lembaga-lembaga pendana yang menjadikan fondasi kami sebagai Tifa baru lebih kuat, sehingga kami dapat terus memastikan bahwa cita-cita tentang Indonesia yang lebih terbuka, inklusif, dan berkeadilan dapat diwujudkan melalui tindakan nyata.

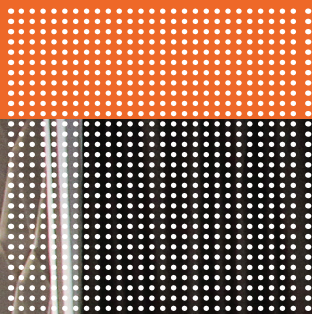
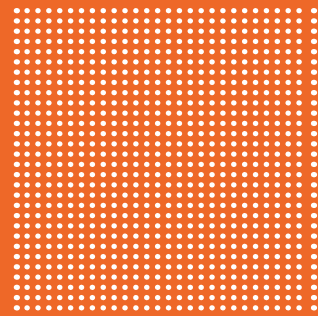
Perjalanan tahun 2023 kami lalui dengan menjalankan program-program kolaborasi bersama mitra yang bertumpu pada segitiga program strategis, yaitu hak asasi manusia dan demokrasi, tata kelola sumber daya alam, dan tata kelola data digital, yang telah kami jalankan sejak 2021. Kerja-kerja Tifa pada program strategis meliputi isu-isu pemenuhan hak dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan, keamanan bagi jurnalis, partisipasi masyarakat dalam menciptakan ruang aman pra pemilu 2024, dan pemanfaatan dana bagi hasil untuk pemenuhan standar pelayanan.

”

Perjuangan bersama inilah yang menjadi pencapaian sekaligus menunjukkan transformasi Tifa telah berjalan semestinya. Sekaligus menjadi bukti nyata dari kesungguhan dan komitmen transformasi kami. Tentu berbagai pelajaran berharga kami dapatkan. Kami percaya bahwa langkah-langkah yang telah kami ambil dengan dukungan semua pihak hanya awal dari perjalanan panjang Tifa baru yang panjang. Aral lintang juga akan menyambut kami, namun kami berkomitmen untuk terus berinovasi, bekerja sama, dan menyuarakan demokrasi yang adil.*

Profil Organisasi

- Tentang Yayasan Tifa
- Struktur dan Kepemimpinan
- Dewan Pengurus
- Struktur Organisasi
- Strategi Implementasi Program
- Highlight





Tentang Yayasan Tifa

Pada tanggal 8 Desember 2000, tiga belas penggerak masyarakat sipil Indonesia bermufakat untuk mendirikan Yayasan Tifa. Mereka di antaranya adalah Hadi Soesastro, Felia Salim, Daniel Dhakidae, Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohamad, Bambang Widjodjanto, Tosca Santoso, Riefqi Muna, Debra Yatim, Lukas Luwarso, Budi Santoso, Chusnul Mariyah, dan Smita Notosusanto. Ketiga belas tokoh ini memiliki semangat yang sama dalam mendorong terciptanya masyarakat terbuka, termasuk peningkatan kualitas demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Pemakaian Tifa sebagai nama organisasi memiliki makna filosofi yang mendalam. Sebagaimana kita ketahui bersama Tifa merupakan sebuah alat musik pukul serupa gendang. Tifa jamak digunakan oleh masyarakat adat di wilayah timur Indonesia untuk memanggil warga sekitar agar turut serta dalam pertemuan maupun acara-acara adat lainnya. Alat musik ini juga digunakan oleh masyarakat adat untuk menyebarkan pesan damai dan keharmonisan. Sehingga Tifa diharapkan memiliki kapasitas untuk mewujudkan partisipasi menuju masyarakat yang terbuka, damai, dan harmonis.

Sebagai organisasi yang lahir pasca reformasi, Yayasan Tifa terus berupaya mempromosikan terwujudnya masyarakat terbuka melalui kerja sama untuk isu-isu strategis dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal dengan pendekatan partisipatif. Yayasan Tifa terus berupaya mendorong penguatan peran masyarakat sipil dalam perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan marjinal, perluasan hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat, advokasi bagi perwujudan media yang bebas, perbaikan tata kelola pemerintahan serta transparansi dan akuntabilitas dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik, serta sejumlah program lain yang selaras dengan upaya mewujudkan masyarakat terbuka di Indonesia.

Yayasan Tifa menggunakan dua pendekatan dalam menjalankan pelbagai kerja dan mandat organisasi. Pertama, Yayasan Tifa menyediakan sumber daya untuk mendukung kerja organisasi masyarakat sipil. Artinya Yayasan Tifa berperan sebagai *intermediary organization*. Yayasan Tifa juga seringkali berperan sebagai simpul (*hub*) dan pengampu diskusi *multistakeholder*, ataupun berperan sebagai katalisator pendanaan serta dapat bekerja sama dengan memberikan *sub-granting* ke organisasi

masyarakat sipil di Indonesia. Kedua, merancang dan mengimplementasikan program secara mandiri sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi.

Sampai dengan 2020, terdapat 733 lembaga yang telah menjadi mitra Yayasan Tifa dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadi bukti komitmen dan upaya Yayasan Tifa dalam menjalankan peran-peran strategisnya. Di antaranya mensinergikan upaya masyarakat sipil Indonesia untuk mendorong kebijakan inklusif yang menghormati Hak Asasi Manusia dan memberikan akses keadilan bagi seluruh warga negara. Yayasan Tifa terus memperkuat upaya pencarian keadilan atas Sumber Daya Alam dan Lingkungan terutama bagi masyarakat terpinggirkan. Yayasan Tifa juga berfokus pada pendalaman inovasi, demokrasi dan gerakan sosial, serta transparansi dan akuntabilitas dalam ekosistem data digital.

Visi:

Terwujudnya masyarakat terbuka yang berkhidmat kepada kebinekaan, kesetaraan, dan keadilan

Misi:

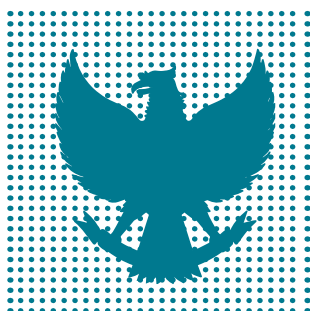
1. Menjaga iklim demokrasi yang memastikan kebebasan sipil termasuk dalam ranah digital dan terpenuhinya hak asasi manusia
2. Mendorong tata kelola yang baik di sektor pemerintah, korporasi, dan organisasi masyarakat sipil
3. Memperkuat sumberdaya masyarakat sipil untuk membangun sinergi dan partisipasi berbasis pengetahuan dalam pembangunan berkelanjutan yang inklusif
4. Mendorong upaya perlindungan wilayah kelola rakyat dan penanganan iklim yang inklusif, adil, dan berkelanjutan
5. Meningkatkan kolaborasi multipihak yang konstruktif dalam pembangunan demokrasi dan HAM, manajemen SDA dan Perubahan Iklim, serta tata kelola data digital

Nilai-Nilai Yayasan Tifa



Keterbukaan

Sifat atau kondisi tidak adanya rahasia, apa adanya, bersedia menerima masukan, toleran, dan sejenisnya. Dalam ketatanegaraan, negara terbuka adalah negara yang pemerintahannya tidak menutup diri, transparan, serta terbuka terhadap kritik dan saran pembaruan. Dalam masyarakat terbuka, warga bebas mengemukakan pendapat, ide, kritik, dan pada saat yang sama warga juga siap menerima masukan untuk perbaikan.



Kebinekaan

Tatanan yang tidak didominasi oleh tata nilai, titik pandang, maupun pola pikir dan sikap suatu kelompok tertentu. Kebinekaan berarti keberagaman diakui dan dihargai dalam sebuah komunitas dan kehidupan publik. Masyarakat yang berkhidmat kepada kebinekaan adalah masyarakat yang bukan hanya mengakui perbedaan, melainkan juga melihat keberagaman (sosial- budaya, agama, ras, pandangan politik, dan lainnya) sebagai suatu aset, nilai tambah, dan kekuatan.



Kesetaraan

Situasi ketika setiap warga memiliki status dan hak yang sama di mata hukum. Masyarakat yang setara berupaya menghapus diskriminasi berbasis gender, agama, sosial-ekonomi, mayoritas-minoritas, elite-nonelite, kaya-miskin, dan bentuk ketidaksetaraan lainnya, sehingga setiap individu mendapat perlakuan yang sama dari negara. Termasuk dalam hal ini adalah memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, mendapatkan pekerjaan serta tempat tinggal yang layak, dan hak dasar lainnya.



Keadilan

Sifat ketidakberpihakan. Negara yang menjunjung keadilan adalah negara yang memenuhi dan melindungi hak dan kewajiban setiap warganya, serta tidak berperilaku sewenang-wenang terhadap warganya.

Struktur dan Kepemimpinan

Sebagai organisasi yang memperjuangkan keterbukaan dan akuntabilitas, Yayasan Tifa tentu saja mengutamakan keduanya sebagai prinsip pokok dalam upaya mencapai tujuan di bidang sosial-kemanusiaan. Dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Tifa menata strukturnya dengan empat organ utama, yaitu Pembina, Pengawas, Pengurus, dan Kantor Eksekutif.

Dewan Pembina Tifa saat ini dijabat oleh Felia Salim dan Todung Mulya Lubis. Posisi Pengawas, yang mengarahkan dan meninjau kegiatan-kegiatan Tifa, ditempati Delima Kiswanti (wafat pada 19 Mei 2023). Komposisi Dewan Pengurus terdiri dari Endy Bayuni (Ketua), Jacklevyn Frits Manuputty (Wakil Ketua), Shita Laksmi (Sekretaris), Dyan Shinto E. Nugroho (Bendahara), Petrarca Karetji (Anggota) dan Natalia PP Soebago (Anggota).

Di jajaran Kantor Eksekutif, Tifa dipimpin Oslan Purba sebagai Direktur Eksekutif. Untuk mendukung kegiatan sehari-harinya, ada tim manajemen yang terdiri atas Dennis Tjandrasa sebagai *Finance Manager*, Bernadetha Chelvi Yuliasuti sebagai *Office & HR Manager* dan Debora Irene Christine sebagai *Project Manager Data Policy and Governance*.

Untuk menjalankan program-programnya, ada tim program dengan komposisi sebagai berikut Zico Mulia (*Program Officer for Human Rights*), Dorta Pardede (*Program Officer for Natural Resources*), Fuji Aotari (*Program Officer for Data Policy and Governance*), Lorensia Brahma (*Project Officer for HEAL*), Arie Mega Prastiwi (*Project Officer for Jurnalisme Aman*), Afrizal (*Project Officer for Budget Advocacy*), Nurma Fitrianingrum (*Project Officer for Program Review*), Roni (*Program Assistant for Human Rights*), Mahardhika (*Project Officer Digital Democracy*), Pawestri Rena Ningtyas (*Program Assistant for Natural Resources*), serta Bernadetha Gracia Lavitasari (*Program Assistant for Data Policy and Governance*). Paul Mario Ginting sebagai *Grant Officer* dan Devi Elsa Pratiwi sebagai *Grants Assistant* turut melengkapi komposisi tim program.

Di luar itu ada tim *support*, yang terdiri dari; Supri Hartini (*Finance Officer*), Rully Safriani K (*Finance Officer*), Andi Pangeran Petta (*Monitoring, Evaluation, and Learning Officer*), Realita Sukma Febiarti (*Knowledge Management and Communications Officer*), Harry Rizky P (*Information Technology Officer*), Dwi Afriyanti (*General Affair*), Rismayanti dan Alifia Nanda Putri (*Finance Assistant*).

Dewan Pengurus



Endy Bayuni adalah kolumnis The Jakarta Post dengan pengalaman jurnalisme lebih dari 40 tahun, sebelumnya pernah menjadi pemimpin redaksi media berbahasa Inggris ini. Sejak 2020, ditunjuk sebagai satu anggota awal Dewan Pengawas Meta, lembaga independen mengawasi kebijakan dan praktek moderasi konten perusahaan media sosial ini. Termasuk sebagai anggota dewan International Association of Religion Journalists (IARJ) yang didirikan bersama 22 wartawan dunia lainnya tahun 2012, dan menjadi Direktur Eksekutif di 2016–2021. Pada tahun 2003/2004 menjadi peserta program fellowship Nieman di Harvard University dan senior fellowship di kantor East West Center (lembaga dibawah naungan Universitas Hawaiii) di Washington DC tahun 2011.



Jacklevyn Frits Manuputty. Sejak tahun 1989, aktif terlibat dalam berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan, sebagai penulis, narasumber, dan fasilitator di berbagai acara nasional dan internasional dalam mempromosikan perdamaian, hubungan antaragama, isu lingkungan hidup, dan pendidikan multikultural. Telah mengembangkan model “Dialog Antaragama dan Manajemen Perdamaian Berbasis Komunitas” dan gerakan “Provokator Perdamaian”, yang telah menjadi model yang banyak direplikasi di Indonesia dan negara-negara lain. Memperoleh sejumlah

anugerah dari berbagai organisasi nasional dan internasional, di antaranya Ma'arif Award (Indonesia, Mei 2007), Tanenbaum Peacemakers in Action Award (NYC-USA, Oktober 2012). Pada Februari 2018 mewakili Indonesia menerima Hadiah Pekan Harmoni Dunia dari Raja Yordania, Raja Abdullah II, Amman, Yordania. Februari 2019 memperoleh Doctor Honoris Causa dari Hartford Seminary, Connecticut - USA.



Petrarca Karetji saat ini menjabat sebagai Tim Leader SKALA. Pernah menjabat sebagai Kepala Pulse Lab Jakarta, bagian dari Global Pulse Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini berpengalaman panjang di bidang desain dan manajemen proyek, pemecahan masalah untuk beragam tema pembangunan sosial, pengembangan jejaring antar pribadi dan organisasi, dan analisis kelembagaan. Semua itu merupakan buah dari keterlibatan dan perannya di lembaga-lembaga swasta (IDP Education Australia dan PT Austraining Nusantara), publik (World Bank Multi-Donor Support Office for Eastern Indonesia, AusAID Indonesia Director for Poverty Reduction, Regional Development and Decentralisation), dan perguruan tinggi (Universitas Kristen Satya Wacana). Turut berkontribusi dalam program penguatan organisasi masyarakat sipil, seperti Legal Reform Program, Knowledge Sector Initiative Phase 2, BaKTI, dan Australia Development Cooperation Scholarships.



Dyan Shinto E. Nugraha dikenal sebagai salah satu tokoh di Indonesia yang berperan memajukan bidang teknologi. Saat ini dia menjabat Chief Policy and Government Relations GoTo. Menjadi perempuan pertama di jajaran pemimpin di Google Indonesia dan menjadi bagian dari Divisi Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Google Asia Pacific. Kiprahnya di sektor swasta adalah “lompat pagar” dari posisinya sebagai staf khusus Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata Republik Indonesia.

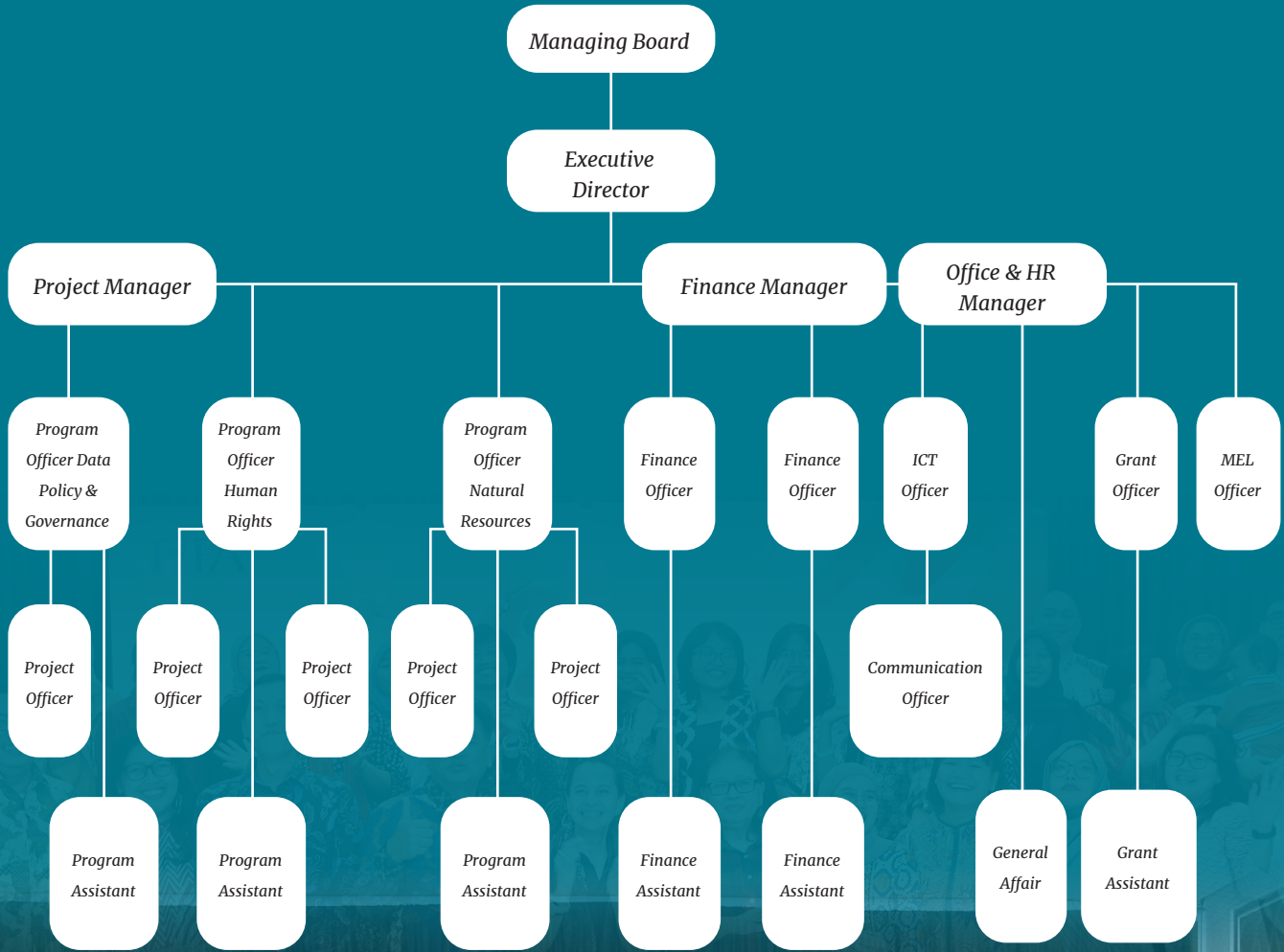


Natalia Soebagjo. Fokus akademis Natalia adalah politik-ekonomi China modern dan telah menerbitkan beberapa tulisan berkaitan dengan bidang ini. Lulusan Sastra Cina Fakultas Sastra UI dan lulusan UC Berkeley dengan gelar *Master of Arts* di bidang Asian Studies. Akan tetapi, pengalamannya di sektor swasta dan LSM telah menggugah perhatiannya pada pentingnya tata kelola sektor publik maupun swasta untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Saat ini aktif sebagai anggota dewan beberapa NGO, antara lain Transparency International Indonesia, WWF Indonesia, Junior Achievement/Prestasi Junior, IPI, dan Publish What You Pay. Pada tahun 2015, Natalia menjadi anggota Pansel pimpinan KPK dan sejak tahun 2022 menjadi anggota Dewan Penasehat Koalisi Anti Korupsi Indonesia untuk sektor swasta. Natalia juga anggota *International Council* dari Transparency International berkedudukan di Berlin, Jerman.



Shita Laksmi saat ini bekerja di Diplo Foundation sebagai Perwakilan untuk Asia Tenggara. Diplo Foundation adalah organisasi yang fokus pada pengembangan kapasitas terkait tata kelola Internet dan kebijakan digital. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Tifa (2019 – 2022). Selama lebih dari 24 tahun, Shita telah bekerja di organisasi pembangunan internasional dan nasional, quasi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam isu terkait transparansi dan akuntabilitas; data terbuka; media; data pribadi serta tata kelola Internet. Shita pernah menjadi Tenaga Ahli di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya, Shita telah menghabiskan lebih dari 10 tahun di Hivos kantor Asia Tenggara terutama di Indonesia, Filipina dan Timor Leste. Tahun 2014 – 2017, Shita adalah anggota *Multistakeholder Advisory Group* untuk Internet Governance Forum di PBB dan saat ini sebagai penasehat di Asia Pacific School of Internet Governance juga Dewan Pengawas SAFEnet. Tahun 2020, Shita lulus dengan kategori Pass with Distinction dari University of Malta dalam bidang Contemporary Diplomacy in Internet Governance. Tahun 2019, Shita mendapatkan sertifikasi Data Protection Officer dari Maastricht European Center on Privacy and Cybersecurity. Sejak 2024, Shita memulai aktivitas sebagai anggota komunitas ICANN untuk terutama di Asian, Australasian and Pacific Islands Regional At-Large Organization (APRALO).

Struktur Organisasi

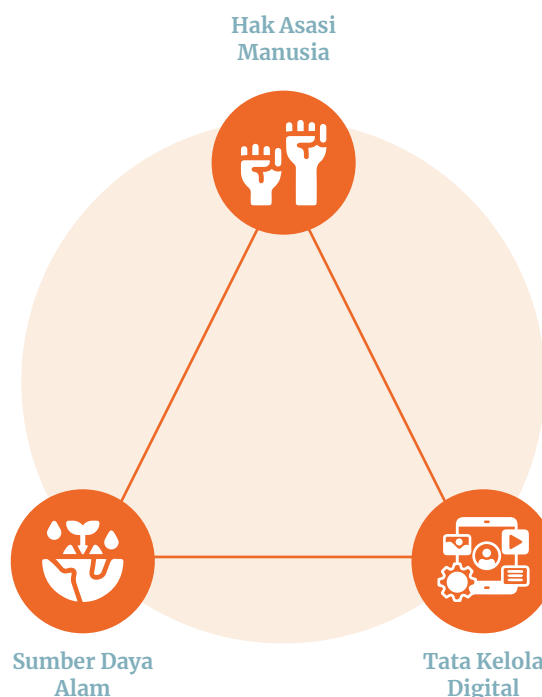


Strategi Implementasi Program

Pada tanggal 16-18 Januari 2023, Yayasan Tifa merumuskan program kerja tahunan yang menjadi dokumen teknis sebagai panduan bagi pelaksanaan aktivitas program di Yayasan Tifa untuk tahun 2023. Dokumen yang selanjutnya disebut sebagai Program Memo merupakan turunan dari dokumen *Strategic Planning 2020-2024*. Yayasan Tifa merumuskan logika program secara runut yang terdiri dari lima *outcome* yang diharapkan memberikan dampak: Pemerintah dan masyarakat yang terbuka, pluralis dan toleran yang memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak kelompok minoritas dan rentan (kelompok minoritas agama dan keyakinan, masyarakat adat, minoritas gender dan seksualitas) serta korban pelanggaran HAM berat di masa lalu.

- **Outcome 1.** Menguatnya gerakan masyarakat sipil dalam menyuarakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia serta melawan segala bentuk ketidakadilan dan otoritarianisme
- **Outcome 2.** Meningkatnya akses dan kontrol masyarakat adat/lokal terhadap pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan
- **Outcome 3.** Menguatnya akuntabilitas sosial dan partisipasi publik yang bermakna dalam pelembagaan demokrasi
- **Outcome 4.** Meningkatnya praktik tata kelola data digital yang efektif
- **Outcome 5.** Masyarakat sipil semakin efektif dan akuntabel dalam mendorong terciptanya masyarakat yang terbuka dan demokratis.

Yayasan Tifa menggunakan pendekatan implementasi yang sama yaitu pendekatan segitiga dalam mengimplementasikan kerangka programnya, yaitu **Hak Asasi Manusia, Sumber Daya Alam dan Tata Kelola Digital**. Pendekatan segitiga ini mencoba memberikan hubungan antara setiap tematik program yang dikembangkan oleh Tifa.



Meskipun dalam tata laksanaanya, segitiga pendekatan Tifa ini bisa dilakukan dengan komposisi dan beban yang berbeda-beda. Semisal dalam tata kelola sumber daya alam, selain mendorong keadilan dan keberlanjutan lingkungan hidup, juga terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat/lokal (sipil dan politik/sipol maupun ekonomi, sosial, dan budaya/ekosob). Dalam tata kelola digital, dirumuskan pula sebagai bagian dari upaya mendorong perlindungan hak-hak kelompok rentan dan minoritas dalam ranah digital seperti perlindungan data pribadi maupun moderasi konten. Kedepannya, Tifa akan lebih memperkaya mekanisme kerja pendekatan segitiga ini dengan membangun dokumen pelengkap yang lebih komprehensif. Diharapkan segitiga pendekatan ini bisa mendorong inovasi di Tifa serta membuat program Tifa menjadi lebih unik.

Highlight

Sebaran Wilayah Kerja



1. Nanggroe Aceh Darussalam

- Kota Banda Aceh
- Kabupaten Aceh Besar

2. Sumatera Barat

- Kota Padang

3. Bengkulu

- Kabupaten Rejang Lebong (Desa Tebat Pulau, dan Baru Manis)

4. Jawa Barat

- Kota Bogor
- Kota Tangerang Selatan
- Kabupaten Indramayu (Desa Kendayakan)

5. DKI Jakarta

6. DIY

- Kabupaten Bantul (Kalurahan Guwosari, dan Kalurahan Sriharjo)

7. Jawa Tengah

- Kota Semarang

8. Jawa Timur

- Kabupaten Tuban (Desa Sugihan, Desa Pongpongan, Desa Sokosari, Desa Sumurcinde)

9. Bali

10. Kalimantan Tengah:

- Kabupaten Barito Utara (Desa Beringin Raya, Desa Hurung Enepe)

11. Sulawesi Selatan

- Kota Makassar

12. Maluku:

- Kabupaten Maluku Tengah (Desa Liang)

13. Papua

- Kota Jayapura

14. Papua Barat

- Jayapura, Keerom, Biak, Merauke, Manokwari, Sorong, Wamena, Timika dan Paniai

Yayasan Tifa mengimplementasikan langsung program di wilayah kerja atau melalui *grant making* yang dikelola mitra lokal di wilayah kerja. Selain itu Tifa juga memiliki beberapa program yang memiliki cakupan nasional. Artinya program tersebut tidak berbasis wilayah.



Sepanjang tahun 2023 Yayasan Tifa mengelola 8 program, di antaranya Jurnalisme Aman, Keadilan Transisional, *Integral Security Resource Hub*, Demokrasi Digital, Pelindungan Data Pribadi, *Review Program*, Dana Bagi Hasil Sumber Daya, dan Hibah Open Society Foundations. Program yang dikelola Yayasan Tifa bertumpu pada 3 cakupan isu, Hak Asasi Manusia, Tata Kelola Sumber Daya, dan Tata Kelola Digital.

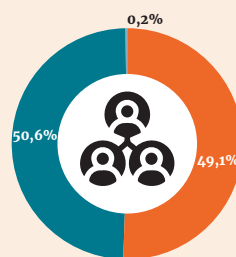
Mitra Kolaborasi

- HRWG
- PPMN
- SAFEnet
- ELSAM
- Combine Resource Institution
- Akar Foundation
- HUMANUM
- ICJR
- IPC
- Jerat Papua
- AIDP
- Kontras Aceh
- AJAR
- KRKP
- KruHA
- LBH Jakarta
- LBH Semarang
- LBH Padang
- LBH Pers
- LP3BH
- Papuan Voices
- PBHI
- IJRS
- PR2Media
- Pulih Aceh
- PUSAD Paramadina
- TII
- YSIKA
- Fitra Jatim
- Yayasan Tambuhak Sinta

Pemangku Hak 2023

9.312

Total Pemangku HAK (2023)



Perempuan

Laki-Laki

Gender Lainnya

Ragam Donor

- The Embassy of the Kingdom of the Netherlands
- Open Society Foundations
- Luminate Group
- Royal Norwegian Embassy
- David and Lucile Packard Foundation.



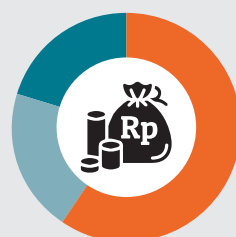
Pengelolaan Anggaran



Pada tahun 2023 Tifa mengelola anggaran dari 5 donor yang diimplementasikan untuk mengelola beragam program. Di antaranya dikelola melalui implementasi langsung dan *grant making*.

Total anggaran yang dikelola

Rp 15.543.623.320



Human Resource: Rp 9.252.222.417

Nature Resource: Rp 3.172.974.789

Digital Democracy: Rp. 3.118.426.114

Cerita Perubahan

Jurnalisme Aman

Keadilan Transisional

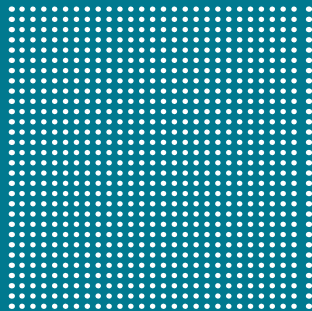
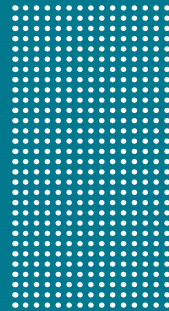
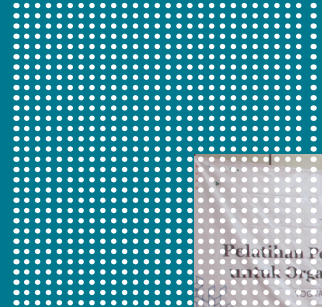
DBH-SDA

Review Program

Demokrasi Digital

Pelindungan Data Pribadi

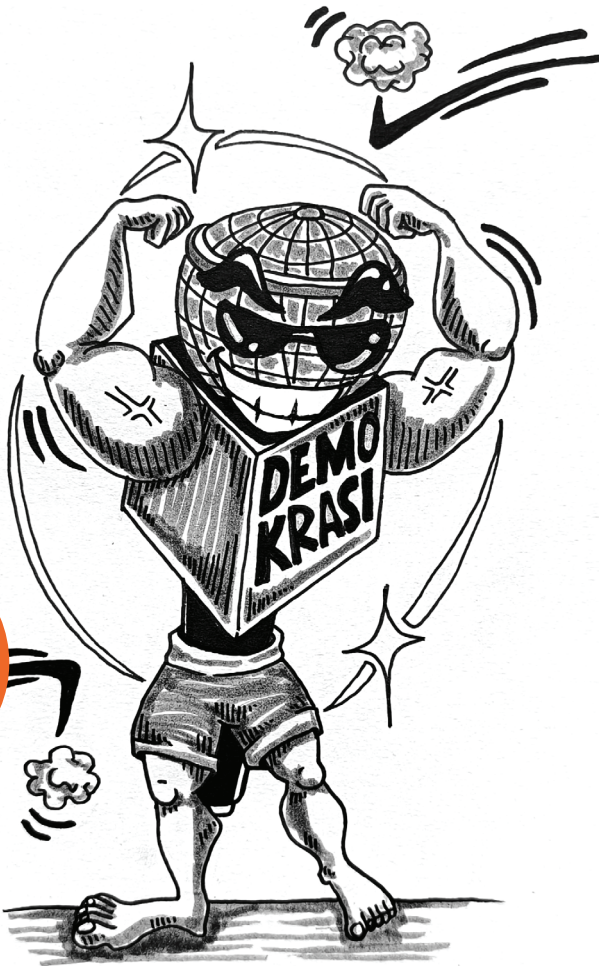
Hibah Open Society Foundations





Jurnalisme Aman

Jurnalisme Kuat untuk Demokrasi yang Kokoh



18

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami stagnasi, bahkan dalam beberapa laporan internasional mengarah pada regresi. Menurut laporan Economist Intelligence Unit (EIU), salah satu indikator menurunnya demokrasi tahun 2023 adalah kebebasan sipil. Pelbagai kekerasan menimpa tidak hanya masyarakat sipil, namun juga dialami kalangan jurnalis. Sepanjang 2021, AJI (Aliansi Jurnalis Independen) mencatat sebanyak 43 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis. Padahal jurnalis memiliki peranan yang signifikan dalam menguatkan demokrasi. Sebagai pilar keempat demokrasi, jurnalis perlu mendapatkan penguatan dari pelbagai resiko dan ancaman.

Tifa mencatat setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang mengganggu kebebasan jurnalis. *Pertama*, regulasi represif dan mekanisme pengaduan yang tidak efektif. *Kedua*, minimnya perlindungan jurnalis. *Ketiga*, minimnya

pedoman keselamatan. Berangkat dari keresahan ini Tifa bersama HRWG dan PPMN menggagas konsorsium program Jurnalisme Aman. Jurnalisme di Indonesia membutuhkan lingkungan yang aman untuk mendukung penguatan demokrasi.

Program yang digagas akhir 2021 ini menggunakan dua strategi kunci dalam implementasi program. *Pertama*, membangun mekanisme penanganan keluhan yang efektif di tingkat nasional dan lokal. Dalam praktiknya memerlukan aksi kolektif yang melibatkan lintas pemangku kepentingan, di antaranya Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Dewan Pers, AJI, Komite Keselamatan Jurnalis, Kepolisian, serta Kejaksaan Agung. *Kedua*, menciptakan ruang aman untuk jurnalisme dan memberdayakan jurnalis. Peningkatan keterampilan jurnalis dalam pelaporan dan perlindungan diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital dan fisik yang aman.

Pada tahun ketiga implementasi, Jurnalisme Aman mampu membangun kesadaran maupun solidaritas lintas sektor terhadap isu keamanan jurnalis. Salah satunya adalah membangun relasi dengan Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kopolnas). Lembaga yang merupakan salah satu aktor kunci dalam jaminan keamanan jurnalis bersepakat dengan konsorsium Jurnalisme Aman untuk mendukung mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan yang menimpa jurnalis. Adanya komitmen lintas sektor merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem jurnalisme yang aman.

Terciptanya ekosistem jurnalisme yang aman memerlukan penguatan beragam aktor, termasuk jurnalis sebagai pemangku hak dalam program Jurnalisme Aman. Intervensi terhadap jurnalis dilakukan melalui serangkaian peningkatan kapasitas dan pengetahuan yang membentuk jurnalis tangguh. Sehingga jurnalis mampu memetakan potensi kerentanan dan mengatasi kekerasan. Para jurnalis juga disiapkan untuk mampu menerabas hambatan dalam kebebasan pers.





Pembukaan Kegiatan “Lokakarya dan Sarasehan: Kebebasan Pers, Berekspresi, dan Penanganan Kekerasan terhadap Jurnalis untuk Anggota Polri di wilayah Polda Maluku” pada 25 Oktober 2023 (Dok. Human Rights Working Group)

Konsorsium Jurnalisme Aman bahu-membahu mengatasi pelbagai tantangan dalam meningkatkan keamanan, perlindungan, serta kebebasan pers di Indonesia. Yayasan Tifa berhasil merumuskan Indeks Keselamatan Jurnalis yang bisa digunakan untuk pemetaan situasi jurnalis di Indonesia. Berdasarkan hasil studi Keselamatan Jurnalis menunjukkan situasi jurnalis Indonesia dalam kategori “agak terlindungi” dengan skor 59,8 dari 100. Jurnalis Indonesia masih mendapatkan pelbagai bentuk kekerasan. Di antaranya pelarangan liputan, pelarangan pemberitaan, penghapusan hasil liputan hingga kekerasan fisik, ancaman pembunuhan, teror dan intimidasi. Indeks Keselamatan Jurnalis tidak hanya memberikan data situasi keamanan jurnalis namun juga mendorong adanya perubahan kebijakan dan praktik yang efektif dalam perlindungan jurnalis. Sehingga meningkatkan kondisi kerja dan profesionalisme jurnalistik di Indonesia.

Capaian program yang patut juga dicatat adalah kontribusinya dalam pelaporan UPR (*Universal Periodic Review*) dan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Review*), keduanya merupakan tinjauan berkala terhadap pemajuan Hak Asasi Manusia di masing-masing negara. Masukan yang penting adalah terkait perkembangan kebebasan pers Indonesia yang di orkestrasi HRWG dan jaringan. Jurnalisme Aman memiliki relevansi yang kuat dalam menyediakan informasi perkembangan situasi kebebasan pers di Indonesia. Basis data, kasus, maupun pembelajaran yang muncul baik dari pemangku hak maupun implementasi program memberikan pengayaan laporan lapangan yang disajikan kepada dunia internasional.

Melalui kolaborasi yang kuat dan inklusif antara Tifa, HRWG, dan PPMN, Jurnalisme Aman telah membawa

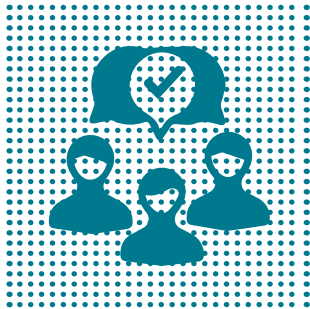
dampak penting dalam ekosistem jurnalisme, mendukung kebebasan pers, serta berkontribusi pada pemeliharaan demokrasi di Indonesia. Jurnalisme Aman tidak hanya fokus pada penguatan kapasitas aktor-jurnalis, namun juga penguatan jaringan lintas sektor, serta advokasi kebijakan.

Saat ini keamanan jurnalis tidak lagi dipandang sebagai isu sektoral, kepentingan jurnalis atau organisasi jurnalis semata, namun perlu pelibatan dan aksi-aksi kolektif dari berbagai pemangku kepentingan. Sehingga keamanan jurnalis menemukan relevansinya dalam konteks memperkuat demokrasi. Pelembagaan ekosistem jurnalisme aman membutuhkan strategi yang lebih inklusif dan efektif di masa yang akan datang.



Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama HRWG dan Kompolnas, 2023 (Dok. Human Rights Working Group)

Capaian Program



- **Konsorsium Jurnalis Aman**

Berhasil membangun kolaborasi dengan lembaga pemerintah, di antaranya Komnas HAM, Dewan Pers, dan Kompolnas.



- **Komitmen Kompolnas** dalam pengaduan dan penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis.



- **Perbaikan Ekosistem Jurnalis**

Survey Jurnalisme AMAN (jurnalis, jurnalis warga, dan pers mahasiswa) menyatakan **46%** responden merasakan adanya peningkatan keamanan, **38%**

responden merasa situasi keamanan berada di titik tengah, **16%** menganggap situasi memburuk.

Catatan: Survey ini menandakan masih ada ketidakstabilan dalam keamanan jurnalis dan kebebasan pers di beberapa daerah.



- **Pemangku Hak Program**

322 Pemangku Hak mendapatkan peningkatan kapasitas, di antaranya pers mahasiswa dan jurnalis.

- **Indeks Keselamatan Jurnalis**

Dalam Indeks Keselamatan Jurnalis oleh Yayasan Tifa bekerjasama dengan Populix ini, indeks sepenuhnya bersandarkan pada survei atas persepsi jurnalis dalam isu keselamatan. Hasilnya, **Indeks Keselamatan Jurnalis 2023** memiliki skor **59,8** kategorinya “agak terlindungi”.



Launching Assessment Report Forum Konsultasi Nasional Ragam Pemangku Kepentingan “Mitigasi Keselamatan Jurnalis di Indonesia” diselenggarakan di Jakarta, 17 Mei 2023 (Dok. Tifa dan Tempo.co)



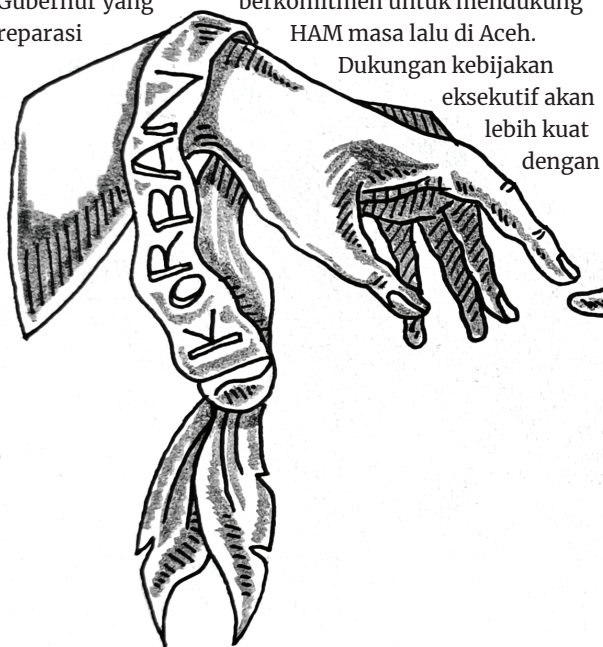
Keadilan Transisional

Jalan Berliku Pemenuhan Hak bagi Korban Pelanggaran HAM

Keterlibatan Tifa dalam mendukung pengejawantahan prinsip dan mekanisme keadilan transisional bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu dilakukan melalui penguatan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Tifa mendesain berbagai program yang diintegrasikan dengan rencana strategis KKR Aceh Tahun 2017-2022. Tifa percaya bahwa mekanisme keadilan transisional berpeluang menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, Papua dan kasus HAM lainnya di Indonesia. Tifa berharap mekanisme keadilan transisional mampu memastikan pemenuhan hak korban serta penguatan KKR. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM harus memiliki mekanisme kredibilitas dan akuntabilitas. Sehingga terjadi perubahan dalam penanganan kasus HAM di Indonesia yang menjunjung prinsip perdamaian dan keadilan transisional. Perjuangan mewujudkan keadilan transisional tidak mudah, untuk itu Tifa berupaya bersama mitra pendukung, yakni KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Aceh, AJAR (Asia Justice and Rights) dan AIDP (Aliansi Demokrasi untuk Papua).

Di Aceh, KontraS berhasil mengupayakan reparasi dan pemulihan hak korban pelanggaran HAM masa lalu. Saat ini, sudah ada sekitar 5.000 dokumen dan status pemberi pernyataan telah terintegrasi ke dalam database SIKKRAT. Pendataan menjadi bagian penting dalam perlindungan data dan integritas korban pelanggaran HAM. Pemenuhan hak korban pelanggaran masa lalu juga ditempuh melalui advokasi kebijakan. Saat ini KontraS mengupayakan adanya peraturan di tingkat Gubernur, atau Instruksi Gubernur yang

berkomitmen untuk mendukung reparasi HAM masa lalu di Aceh. Dukungan kebijakan eksekutif akan lebih kuat dengan

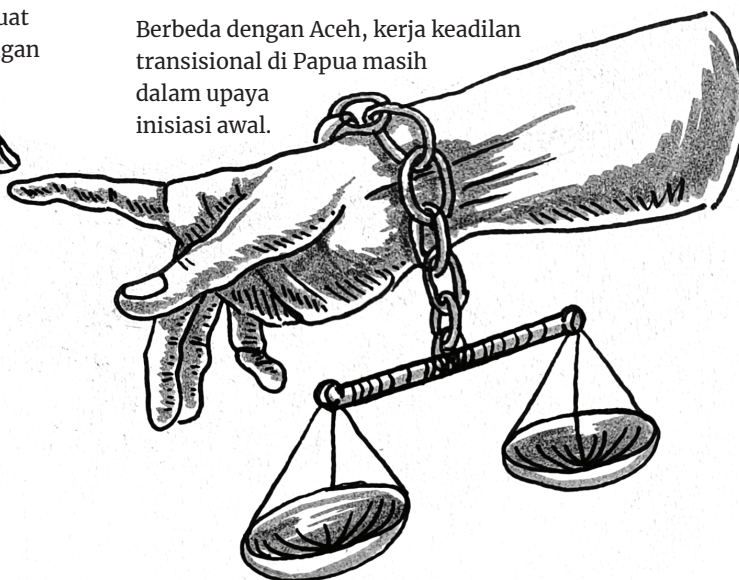


adanya produk legislatif. Maka strategi legislasi berjalan beriringan melalui revisi Qanun KKR Aceh dan SOTK di tahun 2024 mendatang. Pelbagai strategi advokasi diharapkan akan mempercepat pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu.

Sementara itu di tingkat nasional, AJAR mendokumentasikan pelbagai pembelajaran KKR Aceh serta mengawal implementasi rekomendasi reparasi. Pada tanggal 23 November 2023, AJAR telah menyelesaikan laporan temuan KKR Aceh periode pertama. Laporan ini disusun dengan mengedepankan partisipasi bermakna dari korban dan masyarakat sipil. Pendiskusian turut melibatkan publik dan komunitas lokal untuk menampung usulan terhadap mekanisme reparasi KKR Aceh. Saat ini AJAR melihat ada peluang dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dengan terbitnya dua regulasi nasional. *Pertama* Instruksi Presiden No. 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat. *Kedua*, Keputusan Presiden No. 4 tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksana Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat.

AJAR tidak bekerja sendirian, berdampingan dengan KKPK (Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran) terus merespon dinamika penyelesaian HAM masa lalu di level nasional. Tanpa meninggalkan suara akar rumput, AJAR dan KKPK memberi masukan dan rekomendasi kepada Tim PKPHAM, tim pemulihan korban pelanggaran HAM yang saat ini ditunjuk oleh pemerintah. Tidak hanya, itu AJAR dan KKPK telah menyerahkan Kertas Usulan Mekanisme Pendataan, Verifikasi, dan Penyaluran Program Pemulihan Hak Korban dan Kertas Usulan Konsep Program Memorialisasi kepada Komnas HAM dan Menko Polhukam.

Berbeda dengan Aceh, kerja keadilan transisional di Papua masih dalam upaya inisiasi awal.

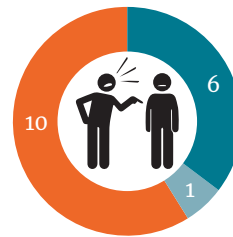




KKRA dan KontraS – Rapat Penyusunan Konsep Memorialisasi, 7 Nov 2023 (Dok. KKR Aceh dan KontraS Aceh)

AIDP (Aliansi Demokrasi untuk Papua) telah melakukan asesmen awal dengan mewawancarai 17 pihak dari Wamena, Jayawijaya, dan Jayapura. Dari serangkaian wawancara dan diskusi publik yang melibatkan sejumlah pihak melahirkan gagasan Komisi Kebenaran, dan Rekonsiliasi versi Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Ide ini dinilai sesuai dengan konteks lokal Papua yang cenderung lebih sensitif. KKR Otsus Papua akan ditindak lanjuti sebagai instrumen penanganan pelanggaran HAM di Papua.

Statistik Kekerasan terhadap Pembela Hak Asasi manusia (HAM) dan Lingkungan tahun 2021

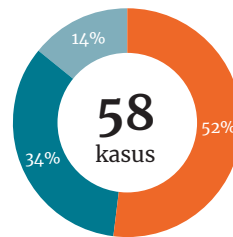


kasus terkait ancaman dan intimidasi

kasus kriminalisasi

permohonan pengusutan kasus munir

Sumber: data Komnas HAM



sektor pertambangan

sektor kehutanan dan perkebunan

KSPN dan lain-lain

Sumber: Kriminalisasi Berbasis Sektor 2021, WALHI 2022



84 kasus pemidanaan terhadap warganet. Sumber: SAFEnet

18 organisasi masyarakat sipil bersama Yayasan Tifa membangun fondasi perlindungan Pembela HAM dan Lingkungan yang terintegrasi.



Mewujudkan keadilan transisional yang memenuhi pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan melalui bingkai programatik. Keadilan Transisional bagaikan jalan terjal dengan segala kompleksitas yang menantang seluruh pihak. Namun, Tifa percaya bahwa perlu menciptakan mekanisme non yudisial yang berfokus pada korban. Keadilan transisional menekankan pada prinsip kebenaran, keadilan, dan reparasi, serta upaya untuk menguatkan memori kolektif dan sejarah pelanggaran HAM sebagai sarana edukasi dan pencegahan. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu mensyaratkan keterlibatan aktif korban dan kelompok masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan keadilan transisional.



Tifa terus mendukung penguatan mekanisme perlindungan Pembela Hak Asasi manusia (HAM) dan Lingkungan. Komitmen ini menjadi semangat Tifa dalam mengantisipasi kemunduran demokrasi yang ditandai dengan penyusutan ruang sipil dan hadirnya bentuk-bentuk neo-otoritarianisme.

DBH-SDA

Partisipasi Bermakna Demi Kebermanfaatan dan Keberlanjutan

Permasalahan sumber daya alam di Indonesia semakin mendesak seiring dengan meluasnya eksploitasi yang dilakukan oleh industri ekstraktif. Tidak mengherankan jika terjadi kerusakan alam di beberapa wilayah. Pemerintah turut serta andil dalam kerusakan ini dengan adanya berbagai kebijakan yang pro terhadap investasi. Sayangnya tidak hanya alam yang rusak, keberadaan industri ekstraktif acapkali merugikan masyarakat terdampak. Selain ruang hidup yang diambil, masyarakat tidak mendapatkan kebermanfaatan dari eksploitasi sumber daya alam. Alih-alih kebermanfaatan, industri ekstraktif menyisakan limbah, sungai yang keruh, udara yang menyesakkan, hingga lingkungan yang tak lagi asri. Sementara Industri ekstraktif mendapatkan nilai ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam, masyarakat terpaksa menanggung kerugian.

Tifa mengidentifikasi terdapat tiga masalah utama dalam persoalan industri ekstraktif. *Pertama*, minimnya akses masyarakat terpinggirkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Industri ekstraktif seringkali meniadakan partisipasi masyarakat terdampak. *Kedua*, kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam menciptakan partisipasi publik yang berarti. Peran pemerintah lokal perlu didorong untuk menjadi mediator bagi kelompok masyarakat terdampak industri ekstraktif. *Ketiga*, kurangnya komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan industri ekstraktif. Jalur komunikasi perlu dibangun antara pihak agar tidak ada yang dirugikan dari adanya eksploitasi sumber daya alam. Sehingga terwujud pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Bagi Tifa pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Masyarakat terdampak selayaknya mendapatkan dana bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh industri ekstraktif. Tifa bersama dengan mitra lokal tidak hanya berupaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, namun juga mendorong pemerintah lokal menjamin adanya transparansi dalam penggunaan dana publik.

Program dana bagi hasil Sumber Daya Alam melakukan intervensinya di kabupaten Tuban dan kabupaten Barito Utara. Di Tuban, Fitra Jawa Timur berhasil mengadvokasi Anggaran Dana Desa di 4 desa, yakni Desa Sugihan, Desa Pongpongan (Kecamatan Merakurak), Desa Sokosari, dan Sumurcinde (Kecamatan Soko). ADD tersebut mengadaptasi rumusan kebijakan berbasis Sumber Daya Alam yang memprioritaskan pemenuhan layanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dari beragam peningkatan kapasitas yang diperoleh selama pendampingan meningkatkan kesadaran Pemerintah dan masyarakat desa akan pentingnya standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi layanan publik di level desa. Terjadinya dialog antar pemerintah desa dan masyarakat menjadi pemicu perbaikan layanan publik yang inklusif mulai dari perencanaan hingga penganggaran.



Dari desa menuju kabupaten, gayung pun bersambut, pemerintah kabupaten Tuban menerima sejumlah rekomendasi SPM ke dalam perencanaan aksi daerah (RAD) untuk tahun anggaran 2024. Rentetan hasil ini diperoleh setelah dilakukan peningkatan kapasitas oleh Fitra Jawa timur. Masyarakat terdampak didorong untuk terlibat aktif dalam advokasi pengelolaan SDA. Di lain sisi, pemerintah lokal diberikan sejumlah perangkat baru, di antaranya melalui workshop penganggaran yang berbasis tata kelola anggaran daerah bersumber dari SDA. Dari intervensi ini juga diharapkan meningkatkan kemampuan pemerintah lokal dalam mengupayakan SPM kabupaten.



Dialog Penyampaian Hasil Pemetaan di Kabupaten Tuban, 20 Juli 2022 (Dok. Fitra Jatim)

Intervensi yang kurang lebih sama dilakukan oleh Yayasan Tambuhak Sinta (YTS) di Kabupaten Barito Utara. YTS mendorong terjadinya peningkatan kualitas proses perencanaan dan penganggaran pembangunan pemerintah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam (DBH–SDA) di Kabupaten Barito Utara. Saat ini pemerintah lokal telah mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal dalam perencanaan pembangunan daerah. Artinya tidak hanya kemampuan masyarakat dalam mengadvokasi pengelolaan sumber daya alam, tapi juga berbagai pemangku kepentingan. Intervensi yang holistik menghasilkan penyusunan Rencana Aksi Daerah serta peningkatan alokasi anggaran dari dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam.

Disisi lain muncul inisiatif dari pemerintah daerah untuk mengadaptasi rumusan kebijakan formula baru berbasis SDA yang memprioritaskan pemenuhan layanan publik dasar yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

Program dana bagi hasil sumber daya alam menawarkan sejumlah dampak yang terlihat dari perubahan aktor, unit layanan, maupun kebijakan. Dari sisi aktor, semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, penganggaran hingga pengawasan pelayanan. Masyarakat terdampak industri ekstraktif terampil melakukan advokasi terhadap pengelolaan dana bagi hasil sumber daya alam dan anggaran pembangunan. Kualitas layanan publik semakin meningkat seiring dengan intensifnya dialog antara pemerintah dan masyarakat. Maka tidak mengherankan program ini mampu melahirkan kebijakan dua arah yang mempertimbangkan masyarakat terdampak industri ekstraktif. Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, artinya dampak ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat terdampak industri ekstraktif. Selain itu semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan dasar dan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah terdampak industri ekstraktif.

“Saya melihat penilaian potensi SDA yang dilakukan Tifa penting untuk dilanjutkan sebagai inisiatif dalam pengembangan BUMDesa “Sugihan Makmur”, Saya kira nanti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,”

Zito Warsito, Kepala Desa Sugihan

”

Pemutaran Film Dokumenter, 15 Mei 2023 di Kabupaten Tuban (Dok. Fitra Jatim)





Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran untuk Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Barito Utara, 29-30 November 2022 (Dok. Yayasan Tambuhak Sinta)

Capaian Program



Pengembangan BUMDes di desa Sugihan Kabupaten Tuban melalui pengembangan budi daya kelengkeng kateki yang menjadi entitas khas lokal. Penguatan potensi lokal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa.

Penyusunan Peraturan Desa (Perdesa) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di wilayah program dengan metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dan *Mini Community-Led Action Planning (Mini CLAP)*.



Peta potensi Sumber Daya Alam (SDA) membantu dalam mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya desa secara lebih efisien berdasarkan potensi yang ada. Peta potensi SDA yang dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran desa yang tepat.

Policy Brief Aliansi Dana Desa di Tuban dalam mendorong inovasi praktik transparansi dan akuntabilitas diterima dengan baik oleh dinas Sosial dan Pengembangan Masyarakat Desa.



Pengelolaan Bisnis berbasis HAM.

Korporasi di Tuban dan Barito Utara telah berhasil memahami dan mengoperasikan aplikasi PRISMA dengan baik.

Aplikasi PRISMA merupakan *mandatory* bagi perusahaan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola korporasi. PRISMA merupakan bagian integral dari regulasi pemerintah yang mengatur operasi korporasi.



Kick off Meeting Program di Kabupaten Barito Utara, 19 Juli 2022 (Dok. Yayasan Tambuhak Sinta)

Review Program

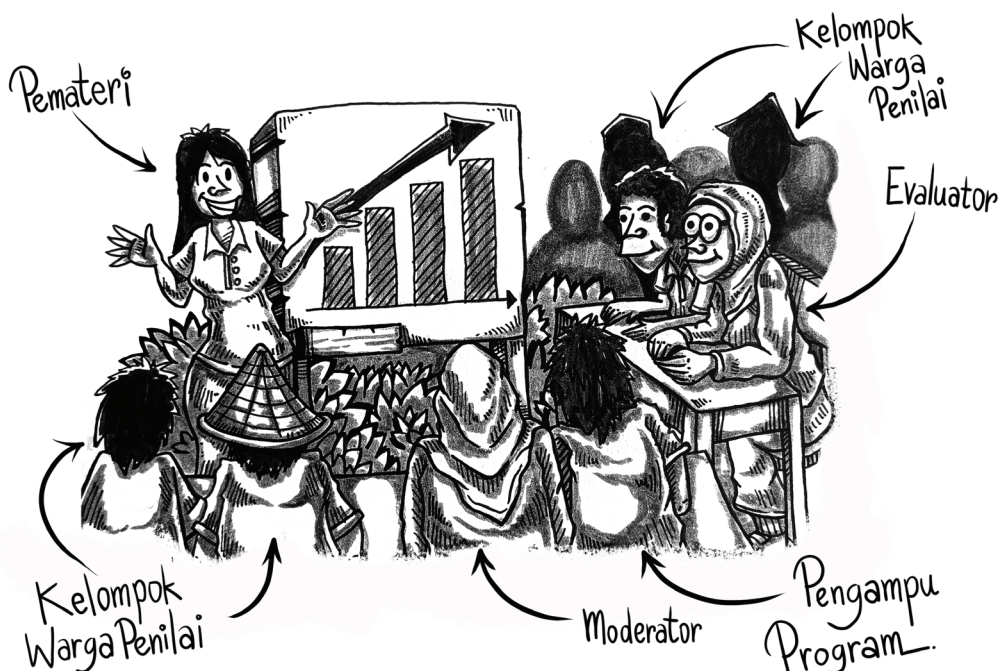
Mendorong Pembangunan Desa Berkelanjutan melalui Evaluasi Program Berbasis Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam menjamin pembangunan desa yang berkelanjutan. UU Desa yang sudah berusia sepuluh tahun secara tegas memiliki dimensi masyarakat yang partisipatif dan mandiri. Masyarakat desa menjadi pilar utama dalam pembangunan desa, yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Sejauh ini praktik pembangunan desa memperlihatkan bahwa UU Desa berupaya menjamin hak serta kewajiban masyarakat dalam pembangunan melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Namun demikian seringkali fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan dalam konteks formal dan prosedural. Salah satu yang terlewat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah pelaksanaan evaluasi untuk seluruh program pembangunan desa. Berbeda dengan tahap perencanaan, evaluasi dimaknai administratif dan prosedural, sehingga acapkali tidak menghitung partisipasi masyarakat. Tidak jarang program pembangunan desa merupakan *template* yang berulang setiap tahunnya tanpa memperhatikan relevansi hingga dampak program tersebut. Padahal evaluasi program pembangunan desa bisa dioptimalkan menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan wajah desa dari tahun ke tahun.

Terlepas dari peluang dan tantangan UU Desa yang selama ini menjadi panduan dalam pembangunan desa, Tifa melihat pelaksanaan evaluasi program relevan dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Maka pada tahun 2020, Tifa menginisiasi program tersebut dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Jepang dan Japan Initiative (JI). Tifa mengimplementasikan “Program Review” sebagai percontohan di Indonesia. Program Review sendiri menjadi mekanisme yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah Jepang selama kurang lebih 20 tahun. Masyarakat di Jepang dibiasakan untuk menjalankan fungsi evaluasi pembangunan yang akuntabel dan partisipatif. Tujuannya untuk memastikan keterwakilan masyarakat sebagai pengambil keputusan atas keberlanjutan program pemerintah.

Review Program merupakan bagian dari langkah reformasi birokrasi yang menekankan pada efektivitas program dan efisiensi penggunaan anggaran. Review program menampilkan kembali masyarakat sebagai pengambil keputusan. Masyarakat diajak untuk menyampaikan kritik dan masukan yang riil dalam meninjau ulang kebermanfaatan pembangunan. Pada praktiknya review program dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengevaluasi keseluruhan program, kegiatan maupun sub kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran.



Implementasi “Review Program” di Indonesia memperhatikan struktur birokrasi maupun kultur pembangunan di Indonesia, sehingga dilakukan berbagai penyesuaian untuk menemukan konteks “Review Program” di Indonesia. Tifa melakukan piloting project untuk dua Kalurahan di Kabupaten Bantul, yakni Kalurahan Sriharjo dan Guwosari. Penentuan desa piloting tentunya melalui proses asesmen dan konsultasi dengan berbagai pihak, di antaranya Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Bappenas. Pemilihan lokus desa dimaknai sebagai upaya membangun dari pinggiran, desa sebagai miniatur negara.

Pada tahun 2023, Review Program memasuki tahun ke dua pelaksanaan program. Tifa menggandeng mitra lokal, Atamawidaya Alterasi Indonesia (AAT) yang melakukan pendampingan program. Sepanjang intervensi program Tifa telah mengintervensi sebanyak 1232 pemangku hak yang terdiri dari aparat desa maupun warga dan komunitas. Tifa telah menyelenggarakan sebanyak 4,8 bentuk peningkatan kapasitas. Upaya peningkatan kapasitas tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman serta kesadaran, namun juga memberikan keterampilan yang penting dalam proses pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Berbagai inisiatif awal telah membuahkan hasil yang patut dirayakan bersama, oleh Tifa maupun pemangku hak. Salah satu capaian penting adalah komitmen pemerintah desa untuk menjalankan Review Program sebagai mekanisme pembangunan desa. Komitmen ini diwujudkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) di dua Kalurahan, Sriharjo dan Guwosari. Surat Keputusan ini menjadi regulasi di tingkat desa yang menjamin adanya pelaksanaan evaluasi program untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pada tanggal 19 Mei 2023, Kalurahan Sriharjo melakukan Review Program dengan agenda evaluasi pengelolaan *foodcourt* Srikemintu dan penyelenggaraan hari jadi. Sementara Kalurahan Guwosari melaksanakan *review* program pada tanggal 20 Mei 2023 untuk agenda evaluasi program pendampingan ibu hamil beresiko tinggi dan layanan sampah BUMKAL (Badan Usaha Milik Kalurahan) Guwosari Maju Sejahtera. Review Program yang dilakukan di Kalurahan Sriharjo dan Kalurahan Guwosari, keduanya berhasil melakukan perbaikan program secara langsung. Selain itu, pelaksanaan *review* program menjadi ruang terciptanya “pasar ide” yang dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah desa untuk bertukar gagasan yang berkontribusi pada keberlanjutan pembangunan.

Dukungan tidak hanya hadir di level desa, namun juga berhasil mendapatkan respon dari pemerintah kabupaten. Review Program di dua Kalurahan, Sriharjo dan Guwosari telah mendapatkan pengakuan dari BAPPEDA Bantul yang melihat kebermanfaatannya program untuk dilakukan replikasi di level kabupaten. Pada bulan Juni 2023, Pemerintah Kabupaten melakukan *review* program untuk

agenda Pajak Award dan pengadaan lampu penerang jalan. Kegiatan ini diorganisir oleh tiga OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yakni BAPPEDA, bagian hukum Sekretariat Desa, dan Inspektorat. Review program menjadi pengalaman pertama masyarakat Bantul untuk memberikan penilaian apakah program pemerintah layak dilanjutkan atau dihentikan.

Saat ini Tifa telah mendokumentasikan “Panduan Komprehensif Review Program” yang merupakan elaborasi pengalaman inisiatif Review program. Pengalaman selama dua tahun program dipadatkan menjadi panduan praktis dari sisi substansi hingga teknis penyelenggaraan Review Program. Panduan ini dimaksudkan dapat diperluas menjadi inisiatif pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Setelah berjalan hampir tiga tahun Review Program dirasa berhasil menciptakan mekanisme pembangunan yang memungkinkan evaluasi program berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Tifa berharap Review program menginspirasi pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, terbuka dan akuntabilitas. Tifa memiliki kepentingan agar Review Program semakin dikenal oleh pemerintah, baik di tingkat lokal, provinsi, maupun nasional sebagai salah satu mekanisme pembangunan berkelanjutan.

“Menurut saya, melalui inilah kami sebagai warga masyarakat bisa tahu bagaimana kinerja pemerintah desa. Maju terus! Semoga ke depan semakin terbuka dan transparan kinerja aparat desa.”

Warga Penilai Kalurahan Sriharjo



Capaian Review Program

Review Program juga menjadi bagian dari Rencana Aksi Nasional (RAN OGI) 2023-2024.

SK Kalurahan Guwosari dan Sriharjo yang mendukung implementasi Review Program



1232

stakeholder dan warga desa memperoleh peningkatan kapasitas.

Demokrasi Digital

Menerabas Tantangan Demokrasi di Era Digital

Pada tahun 2024 Indonesia mengalami siklus pemilu yang panjang. Selain akan menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden, perhelatan pilkada serentak digelar di 54,5 daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Sekitar 204,8 juta jiwa jumlah pemilih pemilu 2024 menjadi bagian penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

Sementara di sisi yang lain lanskap demokrasi Indonesia telah mengalami perubahan, dinamika politik kontemporer tidak hanya tampak dalam diskursus publik, namun merambah jagat maya. Pergeseran lanskap demokrasi berimplikasi pada tantangan baru bagi organisasi masyarakat sipil. Sebagai kelompok yang vokal dalam mengadvokasi hak-hak sipil kelompok rentan, organisasi masyarakat sipil tetap saja menjadi sasaran serangan maupun kekerasan lainnya. Ragam serangan berbasis digital acap kali tidak hanya menyerang organisasi masyarakat sipil, namun juga aktivis pembela HAM.

Dalam tahun politik, kondisi demokrasi digital riuh dengan berbagai kepentingan politik praktis yang tidak jarang mengakibatkan polarisasi dengan munculnya blok politik tertentu. Sayangnya diskursus politik tidak berlangsung sehat, namun keruh karena maraknya *hoax*, *doxing*, *phising* hingga *hacking* dan kebocoran data. Kelompok rentan dan organisasi masyarakat sipil acapkali menjadi pihak yang dirugikan. Laporan situasi Hak-hak Digital 2022 yang dirilis oleh SAFEnet mencatat kenaikan insiden keamanan digital 54% yang menasar pada kelompok masyarakat sipil. Carut marutnya perkembangan demokrasi digital bersisian dengan pelbagai kajian yang menyatakan bahwa serangan digital semakin gencar menghadapi pemilu. Pemilu dinilai memperburuk kebebasan internet realitas. Artinya populasi pemilih yang besar semakin memperlihatkan kerentanan demokrasi digital dan pemilu Indonesia.

Jika dilihat dari lanskap digital, persoalan demokrasi menjadi kian pelik. OMS harus mempersiapkan berbagai respon dan mitigasi dari ancaman dan tantangan. Organisasi Masyarakat sipil menjadi kelompok paling rentan dalam lanskap demokrasi digital setidaknya dikarenakan dua situasi. *Pertama*, OMS merupakan kelompok kritis yang mengadvokasi kelompok marjinal seringkali berhadapan dengan kelompok dominan yang menjadikan OMS sebagai target serangan. *Kedua*, OMS berhadapan dengan penyelenggara pemilu. Dalam situasi

pemilu Tifa telah menemukan sejumlah tantangan penyelenggaraan pemilu dari perspektif tata kelola digital, di antaranya meningkatnya serangan digital untuk membungkam OMS yang didukung dengan peran platform digital dalam mengamplifikasi dampak serangan digital. Dari sisi OMS tampak kedodoran dalam memastikan keamanan digital, selain kekurangan *resource* (anggaran dan SDM), banyak dari OMS yang tidak memiliki mekanisme dan kebijakan terkait keamanan digital. Tifa mendesain program Demokrasi Digital yang berfokus pada penyediaan perlindungan bagi warga Indonesia terhadap ancaman digital dan online atas privasi, keamanan, dan keselamatan mereka selama pemilihan umum, sekaligus dan mempertahankan integritas pemilihan umum di masa mendatang.

Tujuan pertama program ini mempertimbangkan digitalisasi pemilu yang berlangsung sejak 2014 terkait dengan perlindungan data pribadi dalam sistem pemilihan elektronik. Selain itu integritas pemilu perlu didukung dengan adanya jaminan perlindungan data pribadi pemilih di seluruh siklus pemilu. Untuk mencapai tujuan pertama ini, Tifa bekerja sama dengan ELSAM melakukan intervensi aktor maupun *stakeholder* pemilu. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan integritas data pribadi dalam pelaksanaan pemilu 2024. Hal ini mempertimbangkan digitalisasi pemilu yang berlangsung sejak 2014 terkait dengan perlindungan data pribadi dalam sistem pemilihan elektronik. Selama ini belum ada ekosistem bantuan keamanan dan keselamatan digital bagi organisasi masyarakat sipil. Selain itu integritas pemilu perlu didukung dengan adanya jaminan perlindungan data pribadi pemilih di seluruh siklus pemilu.

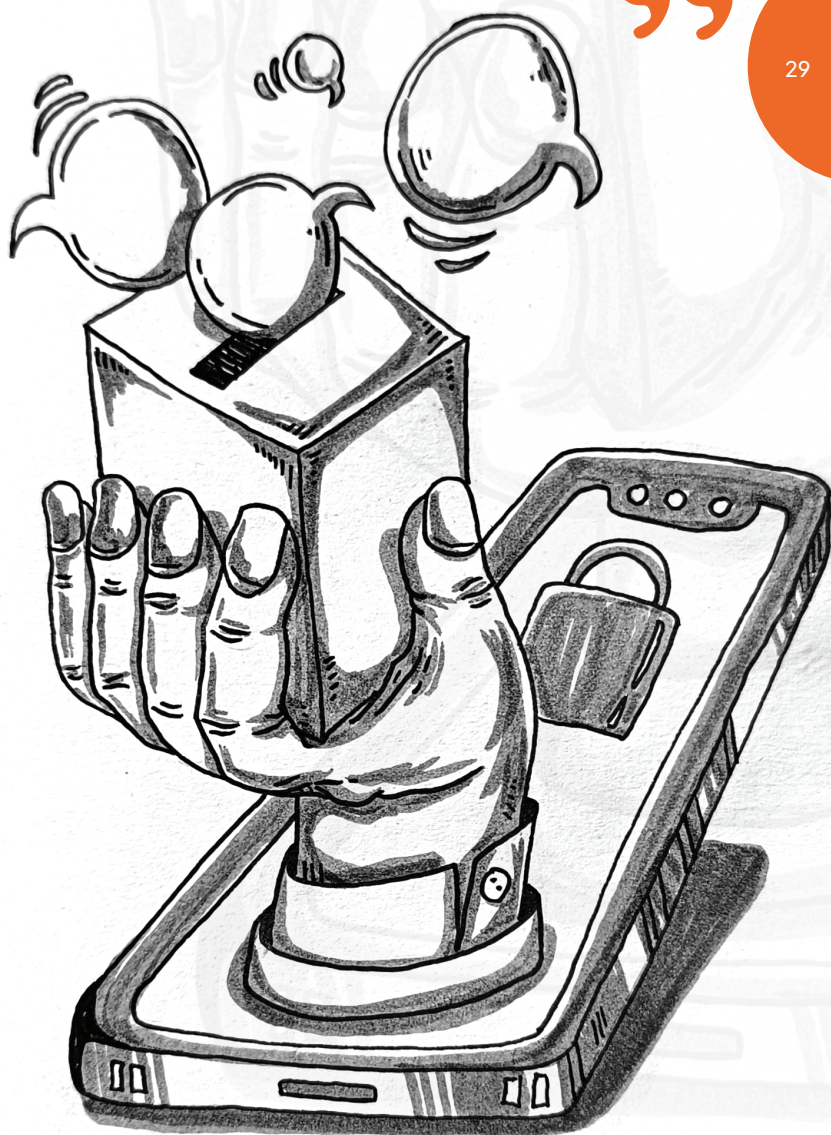
Tujuan kedua, terkait dengan ekosistem bantuan keamanan digital, Tifa telah memetakan profil penyedia layanan keamanan digital dalam skala regional, nasional hingga lokal. Analisis keterhubungan *supply-demand* (penyedia-pengakses) dalam pelayanan keamanan digital berkorelasi dengan upaya penguatan ekosistem digital. Dalam penguatan ekosistem ini, hambatan yang muncul adalah keterhubungan antara penyedia layanan dan OMS masih terbatas, terlebih di level lokal. Di tingkat lokal, penyedia layanan masih berperan sebagai pemberi rujukan. Mekanisme rujukan yang selama ini menjadi praktik masih bersifat informal berdasarkan kedekatan dan kepercayaan. Maka dari itu Tifa mendorong upaya desentralisasi penyedia layanan sehingga bisa diakses OMS di tingkat lokal. Akan jauh lebih efektif jika penyedia

layanan turut menyusun strategi kolaboratif untuk memastikan layanan bantuan keamanan digital dapat memenuhi kebutuhan dari OMS yang mendapat serangan. Terkait dengan ekosistem bantuan keamanan digital, Tifa telah memetakan profil penyedia layanan keamanan digital dalam skala regional, nasional hingga lokal. Di antara hambatan yang muncul adalah keterhubungan antara penyedia layanan dan OMS masih terbatas, terlebih di level lokal. Mekanisme rujukan yang selama ini menjadi praktik masih bersifat informal berdasarkan kedekatan dan kepercayaan. Maka dari itu Tifa mengusulkan adanya lumbung informasi layanan digital yang memuat informasi yang komprehensif. Akan jauh lebih efektif jika penyedia layanan turut menyusun strategi rujukan kolaboratif, selain mendorong desentralisasi penyedia layanan sehingga bisa diakses OMS di tingkat lokal.

Sementara itu, untuk tujuan ketiga, Tifa berkolaborasi dengan SAFEnet dalam upaya perlindungan warga negara dari ancaman digital di masa pemilu. SAFEnet melakukan pemantauan media sosial sebagai bagian dari metode penelitian kuantitatif yang dipergunakan untuk basis advokasi. Pemantauan media sosial berhasil mengidentifikasi berbagai ujaran kebencian yang menyasar kelompok rentan selama masa pemilu 2024. Intervensi program mengarah pada pengurangan risiko yang menimpa kelompok rentan, khususnya di masa pelaksanaan pemilu.

Senada dengan SAFEnet, ELSAM menjadi bagian dari gerakan penyelamatan demokrasi digital. ELSAM melakukan intervensi aktor maupun *stakeholder* pemilu, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan integritas data pribadi dalam pelaksanaan pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sebagai salah satu *stakeholder* kunci mengakui urgensi perlindungan data pribadi pemilih. Kasus jual beli data pribadi pemilih di *dark web* mengindikasikan terjadinya kebocoran data. ELSAM menegaskan perlunya KPU RI untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut.

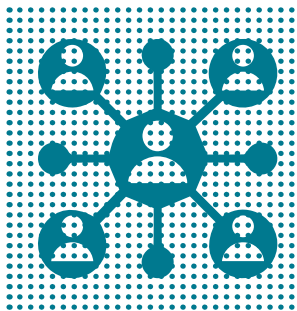
Berbagai upaya simultan yang dilakukan oleh Tifa, SAFEnet, dan ELSAM relevan dengan konteks demokrasi digital. Penyelenggaraan dan tahapan pemilu terus berjalan sampai tahun 2024, dari pileg, pilpres, sampai pilkada serentak. Program demokrasi digital yang saat ini masih terus berjalan terus mengambil inisiatif dalam peningkatan kesadaran perlindungan data pribadi dalam konteks pemilu. Masyarakat sipil berhak mendapat jaminan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Sehingga seluruh hasil pemilu 2024 dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan legitimasi sebagai pemilu yang demokratis.



Daftar Penyedia Layanan Keamanan Digital berdasarkan jangkauan

| Global | Regional | Nasional | Lokal |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • AccesNow • CitizenLab • Digital Defenders Partnership • Electronic Frontier Foundation • Front Line Defenders • International Media Support • Internews • IREX • Kamara | <ul style="list-style-type: none"> • Engage Media • Forum Asia • Security Matters • SAFEnet | <ul style="list-style-type: none"> • AJI Indonesia • AwasKBGO • Ethical Hacker Indonesia • ICT Watch • ID-CERT • Kurawal • LBH Pers • PurpleCode • Taskforce KBGO • TRACE • Greenpeace | <ul style="list-style-type: none"> • BaleBengong • Combine • NgeSEC • JPK Pontianak • Bandung |

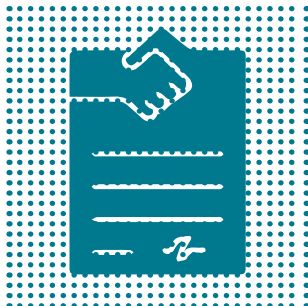
Capaian Program



Pembentukan Koalisi Orang Muda dan Masyarakat Sipil (KOMMAS) di Jakarta. KOMMAS, yang merupakan gabungan dari **15 organisasi dan komunitas** yang berasal dari berbagai sektor seperti SPRI, Gusdurian Jakarta, mahasiswa, dan pemuda.

Komitmen

ID-CERT salah satu penyedia layanan keamanan digital **berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan berbagai penyedia layanan bantuan keamanan digital.**



Ragam Serangan Digital Terpantau Selama Pemilu



Konten Rasis, Konten Misoginis dan Seksis, Konten Homofobik Transfobik dan Bipobik, Konten Xenophobia dan Anti Imigran, Konten Klasis, Konten Abilism, Konten Anti Demokrasi dan Keadilan.

(Sumber: Laporan Ragam Serangan Daring Kepada Kelompok Rentan Di Platform Sosial Media Sosial Selama Pemilu 2014-2019, Tifa-SAFEnet, Oktober 2023)

Pelindungan Data Pribadi

Membangun Ekosistem Digital yang Aman

Perkembangan teknologi informasi melesat semakin jauh, digitalisasi diberbagai sektor telah membentuk ekosistem digital tersendiri. Sampai tahun 2022, 70 persen populasi di Indonesia sudah terkoneksi secara online, artinya sudah menjadi bagian dari ekosistem digital. Potensi ekosistem digital yang besar perlu didukung dengan adanya regulasi pelindungan data pribadi dan mekanisme yang selaras dengan standar internasional.

Perubahan lanskap digital tidak serta merta dibarengi dengan kecakapan literasi digital. Tidak jauh berbeda, situasi masyarakat sipil di Indonesia memperlihatkan kesenjangan aktivisme digital beberapa organisasi masyarakat sipil di daerah. Belum lagi kelompok rentan dan marjinal yang acap kali tidak mendapatkan manfaat dari aktivisme digital. Alih-alih memperoleh kebermanfaatannya dari perkembangan digital, masyarakat sipil berhadapan dengan pelbagai kasus pelanggaran data pribadi. Di sisi lain pengetahuan dan kesadaran masyarakat sipil akan pentingnya pelindungan data masih lemah. Maka tidak mengherankan jika akses bantuan hukum terhadap pelanggaran data pribadi masih terbatas.

Jaminan pelindungan data pribadi bagi masyarakat sipil turut ditopang oleh regulasi yang dipandang belum cukup memadai kebutuhan kelompok rentan. Undang-undang No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang dimaksudkan untuk pelindungan hukum atas hak-hak subjek data pribadi dirasa belum cukup. Penelaahan Tifa terhadap regulasi pelindungan data pribadi memandang perlu adanya otoritas pemangku PDP yang berfungsi dalam pengendalian data gabungan serta mekanisme koordinasi antara otoritas PDP dengan pemerintah. Singkatnya Tifa berkepentingan untuk mengawal adanya aturan turunan dan mendorong kapasitas digital kepada masyarakat tentang pentingnya pelindungan data pribadi.

Melihat rumitnya persoalan pelindungan data pribadi dalam lanskap ekosistem digital, Tifa memerlukan intervensi dari hulu hingga hilir. Tidak hanya advokasi kebijakan, Tifa merasa perlu meningkatkan pemahaman pelindungan data pribadi kepada masyarakat sipil. Di sisi lain jika terjadi kasus pelanggaran data pribadi, maka organisasi bantuan hukum beserta advokatnya perlu dibekali strategi litigasi dan non litigasi.

Sejak program Pelindungan Data Pribadi digulirkan Tifa dan mitra, yakni LBH Pers dan Combain Resource Institute telah mengubah perilaku dan kesadaran data. Kelompok Organisasi Masyarakat Sipil, salah satu pemangku hak program pelindungan telah melakukan perbaikan tata kelola digital di masing-masing lembaganya, di antaranya SOP pengelolaan data dan pemilahan data website. Bisa dikatakan telah berlangsung internalisasi pelindungan data pribadi yang menjadi nilai-nilai kelembagaan.

Sementara dalam upaya mendorong implementasi Undang-undang pelindungan Data Pribadi, Tifa melakukan serangkaian intervensi kepada berbagai pemangku kepentingan salah satunya dengan menyepakati keterlibatan Tifa dalam memberikan konsultasi dan masukan pada Kominfo mengenai penyusunan regulasi turunan UU PDP melalui mekanisme Open Government Indonesia. Selain itu, Tifa aktif mengadvokasi harmonisasi UU PDP dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Undang-Undang Pers, serta legislasi dan regulasi terkait lainnya guna memastikan implementasi UU PDP yang optimal dan kepastian hukum bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia.



Kesadaran perlindungan data pribadi harus terus digaungkan ke berbagai kelompok masyarakat sipil. Baik melalui sosialisasi, pendidikan, ataupun berbagai bentuk peningkatan kapasitas. Seluruh lapisan masyarakat perlu dilibatkan dalam gerakan kolektif. Tifa beruntung telah membidani gerakan advokat publik yang peduli isu perlindungan data pribadi, Jaringan Advokasi perlindungan Data Pribadi Indonesia (JAPPRI). Forum ini diharapkan akan menjadi wadah kolaborasi dan pembelaan terhadap pelanggaran data pribadi. JAPPRI merupakan jejaring LBH Pers yang menjadi salah satu pemangku hak dan mendapatkan serangkaian peningkatan kapasitas menggunakan modul pelatihan perlindungan data pribadi untuk advokat publik.

“Mengingat di era digitalisasi yang menjadi perhatian kita adalah pelanggaran data pribadi, misalnya kebocoran data yang dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dari orang-orang yang tidak memiliki hak atas data tersebut, sementara banyak lapisan masyarakat tidak sadar atas pelanggaran subyek data. Makanya pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas advokat untuk isu perlindungan data dan mengadvokasi hak-hak korban pelanggaran data,”

Mia, PBHI Kalbar



Sejauh ini, program perlindungan data pribadi telah berhasil melakukan penyegaran terhadap lanskap digital Indonesia yang tengah berjibaku dengan persoalan perlindungan data pribadi. Tifa berupaya meningkatkan kesadaran publik, khususnya organisasi masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum untuk memperhatikan keamanan dan perlindungan data pribadi. Pengawasan regulasi menjadi bagian integral untuk memastikan kewajiban pemerintah dalam melayani dan memenuhi kelompok rentan di sektor digital. Secara perlahan, ekosistem digital Indonesia lebih siap dalam menjawab tantangan global, menjamin aktivisme digital yang aman.



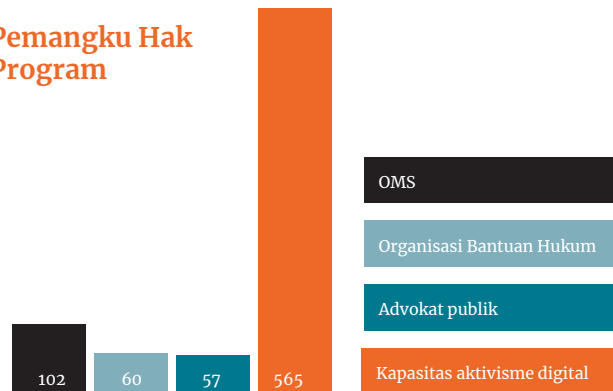
Pelatihan pelindungan data pribadi untuk organisasi masyarakat sipil



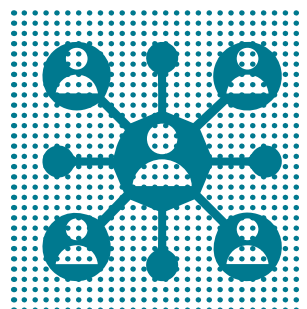
Pelatihan pelindungan data pribadi untuk advokat publik

Capaian Program

Pemangku Hak Program



Inisiasi Jaringan



JAPPRI (Jaringan Pengacara Pelindungan Data Pribadi) wadah kolaborasi dan pembelaan terhadap pelanggaran data pribadi

KA PDP (Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi)

Hibah Open Society Foundations

Mewujudkan Masyarakat Terbuka, Melintasi Aceh Hingga Papua

Yayasan Tifa berkomitmen dalam mewujudkan masyarakat terbuka dengan memperkuat kemitraan strategis di tingkat lokal, nasional dan internasional. Dalam konteks lokal, pada tahun 2023 Tifa membangun kolaborasi konstruktif melalui mekanisme *grantmaking* dengan dukungan Open Society Foundations (OSF). Program yang dikelola oleh 18 mitra yang tersebar dari Aceh hingga Papua di antaranya skema hibah proposal atau *Call for Proposal* dan *Strategic Partnership*. Berpedoman pada pendekatan segitiga dalam kerangka program, maka topik program yang dikelola mitra mencakup HAM-Demokrasi, Sumber Daya Alam dan Tata Kelola Digital.

Pendalaman Demokrasi Menyongsong Pemilu Bermartabat

Dalam konteks Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia, beberapa mitra Tifa berfokus pada berbagai program yang terkait langsung dengan siklus penyelenggaraan pemilu. The Indonesian Institute menaruh perhatian terhadap kampanye politik di media sosial yang berpotensi menjadi medium disinformasi dan manipulasi informasi. TII berhasil mempengaruhi KPU RI untuk merevisi PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) yang mengatur iklan kampanye, termasuk kampanye media sosial. Sejalan dengan TII, PUSAD Paramadina berfokus pada penguatan masyarakat sipil

menghadapi meluasnya narasi negatif selama Pemilu 2024 melalui pendidikan politik. PUSAD mengajak komunitas lintas isu di Bogor dan Tangerang untuk bergerak melawan narasi negatif yang mengandung kekerasan, diskriminasi dan pelemahan diskriminasi. Platform media sosial sebagai medium kampanye terbukti dimanfaatkan pemangku hak untuk turut berkontribusi dalam menyebarkan narasi pemilu bersih.

Demokrasi dan Tata Kelola Digital

Salah satu misi Tifa dalam perencanaan strategis 2020-2024 adalah menjaga iklim demokrasi yang memastikan kebebasan sipil termasuk dalam ranah digital serta terpenuhinya hak asasi manusia. Jika merujuk pada dinamika demokrasi hari ini, terdapat kebijakan yang berpotensi melemahkan demokrasi melalui pengaturan ekosistem digital yang beririsan dengan kebebasan sipil. Di antaranya adalah Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang mempengaruhi hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. ICJR, mitra Tifa mengadvokasi pasal-pasal *cyber enabled crime* dalam UU ITE. Melalui diskusi harmonisasi KUHP yang diundangkan pada Januari 2023, ICJR berhasil mempengaruhi Komisi I DPR RI dalam pembahasan revisi UU ITE kedua. Dalam revisi tersebut pasal-pasal pidana mengalami penyesuaian dengan KUHP baru.

Jaminan kebebasan masyarakat sipil perlu memastikan tidak adanya pelanggaran hak-hak digital. Perkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat di Indonesia membatasi kebebasan



berpendapat, mengakses informasi, mengancam privasi, serta sensor dan pengawasan negara. LBH Jakarta saat ini telah berinisiatif membentuk Tim Advokasi Kebebasan Digital (TAKD) sebagai kelompok advokasi gabungan yang berfokus pada Permenkominformasi No. 5/2020. TAKD menjadi *task force* yang memberikan dukungan hukum yang penting kepada korban melalui jalur litigasi.

Diskursus tata kelola digital tidak terlepas dari platform media sosial yang merupakan bagian penting dalam ekosistem digital. PR2Media mengambil langkah untuk moderasi konten di platform media sosial secara transparan dan akuntabel, dengan cara yang menjamin perlindungan pengguna sekaligus menghormati hak pengguna untuk berekspresi. PR2Media memperkuat upaya mendorong moderasi konten dengan berhasil menyusun dan menyampaikan usulan regulasi, yang dirangkum dalam “Kertas Kajian: Regulasi Pengaturan Konten Ilegal di Media Sosial di Indonesia.” Usulan ini telah disampaikan kepada perwakilan Ditjen Aptika Kementerian Kominformasi dan anggota Komisi I DPR RI. Selain itu PR2Media berencana melanjutkan workshop tentang penyusunan RPP turunan UU ITE.

Mengurai Penegakan HAM dan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Indonesia memiliki sejarah panjang kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang belum terselesaikan. Penanganan kasus-kasus ini terhambat karena kurangnya konsensus dan kerja sama di antara berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga masyarakat sipil dan pembela HAM. Untuk menangani masalah ini secara efektif, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) baik di tingkat nasional maupun daerah. KKR ini diharapkan dapat menjadi mekanisme yang mampu menangani kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan adil dan menyeluruh. Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan (YSIKa) merilis Policy paper “Memastikan Keberlanjutan Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat: Merangkai Jalan Konstitusional untuk Menjamin Adanya Kebenaran, Keadilan, dan Pemulihan Hak Korban”. YSIKa berhasil dalam memperkuat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh melalui fasilitasi dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kantor Staf Presiden (KSP), Komnas HAM, dan Kemenko Polhukam dalam peluncuran laporan hasil temuan KKR Aceh di Aceh.

Upaya yang dilakukan YSIKa bersinergi dengan langkah KontraS Aceh yang mengintervensi langsung KKR Aceh. Pemulihan dan rekonsiliasi korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh harus menerima reparasi yang sesuai dan adil. Saat ini KontraS Aceh sedang mendorong

rancangan regulasi yang menjamin hak reparasi kepada korban. Sementara itu, Pulih Aceh memberikan penguatan kesejahteraan psikososial terhadap penyintas konflik Aceh. Korban HAM masa lalu membutuhkan dukungan untuk mengatasi trauma dan membangun kekuatan internal, serta membantu penyintas konflik menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermakna, sekaligus memperkuat keutuhan sosial komunitas. Berbagai kegiatan yang telah diikuti oleh pemangku hak terbukti telah berhasil meningkatkan resiliensi penyintas konflik. Pendekatan psikososial berhasil menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan bermakna bagi mereka.

Perbaikan kualitas HAM perlu menyasar aktivis pembela HAM yang sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko. Kondisi ini dialami oleh para pembela HAM di Papua yang bekerja dalam situasi yang kompleks, di mana mereka perlu melindungi hak mereka sendiri sambil berjuang untuk hak-hak kelompok rentan. Kerentanan pembela HAM PAPUA membuat JERAT PAPUA merasa penting untuk mengembangkan suatu manajemen perlindungan yang komprehensif, tidak hanya mencakup aspek keamanan fisik, tetapi juga kesejahteraan mental dan emosional. JERAT PAPUA memulainya dengan pembentukan Jaringan Advokasi Kekerasan terhadap Pembela HAM di Tanah Papua yang mengintegrasikan agenda perlindungan HAM Papua. Di sisi lain JERAT PAPUA berhasil menyusun petunjuk teknis perlindungan terhadap pembela HAM yang dirancang untuk membantu pembela HAM dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko pekerjaan. Meskipun inisiatif awal namun menjadi milestone penting dalam memperkuat kapasitas dan perlindungan bagi pembela HAM di Tanah Papua.

Demokratisasi Sumber Daya Alam yang Adil Berkelanjutan

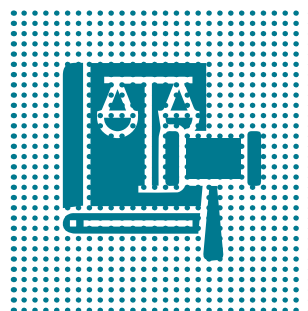
Pembangunan berkelanjutan merupakan isu penting yang masuk dalam SDGs. Eksplorasi sumber daya alam menyebabkan persoalan lingkungan, mulai dari krisis iklim, pangan dan energi. Masyarakat lokal maupun adat yang melekat dengan situs-situs sumber daya

alam menjadi pihak yang dirugikan oleh keberadaan industri ekstraktif, yang merenggut ruang hidup namun juga melanggar prinsip-prinsip HAM. Beberapa mitra Tifa melakukan kerja-kerja penguatan masyarakat adat dan merawat lingkungan. Salah satunya dilakukan oleh AKAR yang melakukan pendekatan perhutanan sosial di Bengkulu. AKAR berhasil mengintervensi Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) di desa Tebat Pulau dan Baru Manis. Menariknya tata kelola kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKM) berhasil diintegrasikan dengan rencana penurunan angka stunting. Integrasi ini merupakan strategi cerdas yang menggabungkan aspek ekologi (tata produksi) dan ekonomi (tata konsumsi) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain pendekatan perhutanan sosial, mitra Tifa menggunakan pendekatan adaptasi perubahan iklim. Di antaranya Humanum dan KKRK yang berupaya memitigasi krisis iklim yang berdampak pada kelompok masyarakat. Di Desa Liang Maluku Tengah, berhasil mengadvokasi kelompok nelayan agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Basis pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan, pemetaan pesisir, dan ekosistem pesisir, laut, dan hutan dalam 10-30 tahun terakhir menjadi kerangka dalam membangun adaptasi perubahan iklim. Kerangka adaptasi-mitigasi perubahan iklim turut dikembangkan KKRK di desa Kendayakan Indramayu. Berbasis pertanian KKRK berhasil mendorong praktik pertanian Biointensif yang ramah iklim. Kelembagaan petani dan kelompok pemuda desa menjadi kunci yang mendorong perubahan kebijakan di tingkat lokal dengan terbitnya peraturan desa tentang Tata Kelola Pertanian Padi Berkelanjutan. Terbitnya peraturan desa ini dianggap sebagai langkah inovatif dalam menggunakan perangkat kebijakan lokal (perdes) untuk mengoptimalkan potensi lokal di desa.

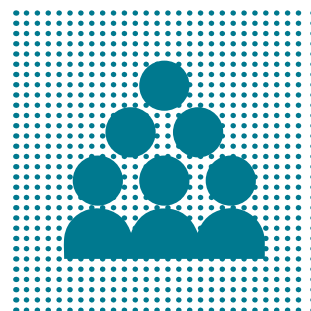
Tifa dalam PEMILU 2024

Menjelang Pemilihan Umum 2024, mitra Yayasan Tifa telah memainkan peran kunci dalam berbagai aspek intervensi, yang secara keseluruhan telah berkontribusi penting terhadap peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Melalui berbagai program yang diinisiasi oleh mitra-mitra ini, telah terjadi kemajuan substansial dalam beberapa area kritis yang berhubungan dengan proses pemilu. Kemajuan diperoleh melalui intervensi kebijakan, penorganisasian akar rumput, dan stakeholder pemilu.



Level kebijakan:
TII mendorong perubahan regulasi kampanye yang transparan dan bertanggung jawab melalui **revisi PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum)**.

Level akar rumput:
PUSAD Paramadina mengembangkan narasi alternatif melalui **pendidikan politik inklusif untuk komunitas**.



Level Stakeholder:
HRWG memperoleh komitmen dari **Kompolnas dalam menjamin keamanan jurnalis selama periode pemilu**.



Epilog

Terus Melantang, Memberi Dampak

Tahun 2023 adalah tahun penyegaran, wajah baru Yayasan Tifa. Meskipun wajah baru, Tifa tetap bersetia pada komitmen dalam mempromosikan masyarakat terbuka melalui kerja sama strategis di tingkat lokal, nasional, maupun internasional dengan mengedepankan pendekatan pelibatan yang konstruktif. Yayasan Tifa menegaskan posisinya sebagai pemangku masyarakat yang berkomitmen pada penguatan Hak Asasi Manusia, Tata Kelola Data dan Digital, serta Tata Kelola Sumber Daya Alam.

Yayasan Tifa mengemban mandat organisasi untuk mewujudkan masyarakat terbuka yang berkhidmat kepada kebinekaan, kesetaraan, dan keadilan. Visi organisasi tersebut diejawantahkan kembali ke dalam program memo tahun 2023. Yayasan Tifa tidak hanya mematok target berbasis outcome saja, namun kerja Tifa dalam rangka menciptakan pemerintah dan masyarakat yang terbuka, pluralis, dan toleran yang melindungi hak-hak kelompok minoritas dan rentan serta korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sepanjang tahun 2023, Yayasan Tifa telah mengimplementasikan program-program yang berfokus pada hak asasi manusia, demokrasi digital dan lingkungan. Program-program tersebut mencakup berbagai tema seperti pendalaman demokrasi, pemilihan umum, perubahan iklim, tata kelola teknologi dan data digital, serta kebijakan inklusif. Cakupan tema yang beragam merupakan respon Yayasan Tifa atas isu kritis yang sedang terjadi di Indonesia. Sehingga program Yayasan Tifa yang melintang dari Aceh hingga Papua tetap kontekstual dan relevan.

Program-program Yayasan Tifa dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok rentan dan minoritas, beberapa di antaranya cukup spesifik seperti kelompok pembela HAM dan lingkungan serta jurnalis. Tidak hanya berfokus pada individu, Yayasan Tifa juga mengintervensi berbagai organisasi masyarakat sipil dari lintas isu. Yayasan Tifa berupaya melakukan penguatan gerakan masyarakat sipil. Kontribusinya dapat dilihat dari terciptanya ekosistem yang aman bagi pembela HAM, lingkungan dan jurnalis. Program Jurnalisme Aman menjadi *benchmark* Tifa dalam gerakan perlindungan jurnalis.

Selain penguatan ekosistem, indikasi demokrasi yang sehat adalah adanya jaminan pemenuhan hak-hak kelompok rentan dan marjinal. Menghadirkan partisipasi bermakna bagi masyarakat dalam pembangunan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan dan inklusi sosial. Masyarakat adat didorong untuk mendapatkan akses serta meningkatkan kontrol dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehingga hubungan masyarakat sebagai pemangku hak dan korporasi sebagai pelaku bisnis memiliki muara yang sama, yakni keadilan sosial dan lingkungan berkelanjutan. Tifa menyebutnya dalam formula Bagi Hasil Sumber Daya Alam, sebagai langkah memperkuat relasi masyarakat dan Sumber Daya Alam.

Dalam upaya pemenuhan hak-hak kelompok rentan, Tifa tidak meninggalkan korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Pendekatan keadilan transisional merupakan pelebagaan demokrasi yang menekankan pada keadilan korban dan rekonsiliasi. Komitmen menghadirkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu dapat dibuktikan dengan berbagai kemajuan yang dicapai KKR di Aceh.

Terkait dengan upaya penguatan demokrasi, Yayasan Tifa memiliki komitmen yang tinggi dalam menciptakan tata kelola digital yang efektif. Dengan adanya perubahan lanskap demokrasi yang menjamah ruang digital, maka



perlu menghadirkan ruang yang aman, transparan dan akuntabel. Pengelolaan ruang digital harus memenuhi prinsip-prinsip HAM, baik dalam tata kelola, layanan publiknya, maupun kebijakan. Di antaranya Tifa memiliki perhatian dalam soal perlindungan data pribadi dan keamanan digital.

Berbagai intervensi program Tifa tahun 2023 telah menghadirkan dampak perubahan, yang dimenangkan bersama, dan patut untuk dirayakan. Namun demikian Yayasan Tifa sadar perlu terus bergerak, makin lantang untuk milestone-milestone selanjutnya. Gerakan advokasi untuk reformasi kebijakan harus lebih masif dalam mendukung HAM, lingkungan dan tata kelola digital. Di sisi lain penguatan organisasi masyarakat sipil tetap menjadi prioritas yang terus dikerjakan melalui program-program Tifa. Khususnya dalam bidang advokasi kebijakan, tata kelola organisasi dan penggunaan teknologi digital. Sektor digital merupakan ruang intervensi utama TIFA selain HAM dan Sumber Daya Alam.

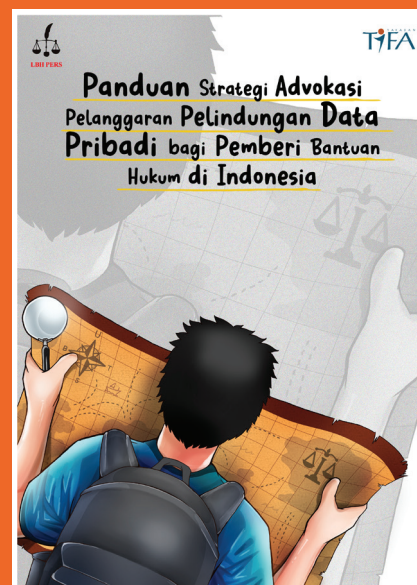
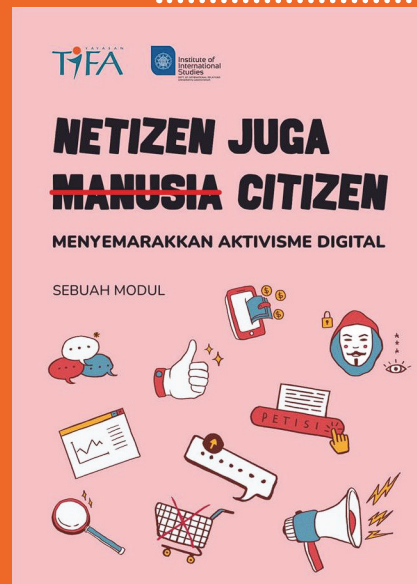
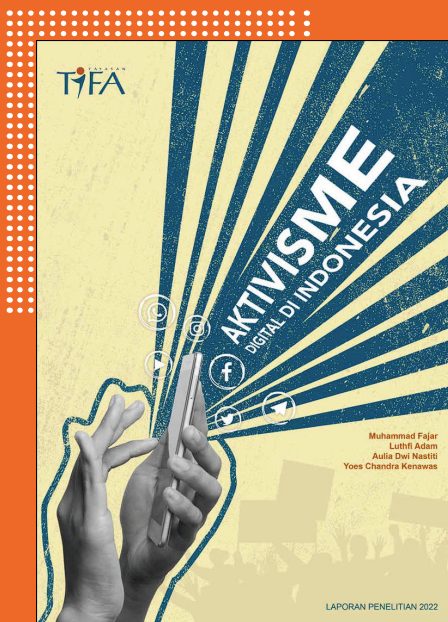
Dalam rangka melipat gandakan dampak, Tifa perlu memperluas dukungan publik. Mobilisasi dukungan publik diperlukan untuk mewujudkan perubahan yang lebih besar. Ke depan perluasan jaringan kolaborasi baik itu lembaga, organisasi internasional maupun lingkungan akademik menjadi kebutuhan gerakan. Ekspansi jaringan akan berkontribusi dalam memperkaya program dan perspektif Tifa dalam mengembangkan ide-inovasi baru yang lebih segar. Membayangkan Tifa di masa yang akan datang adalah Tifa yang makin lantang, makin berdampak!

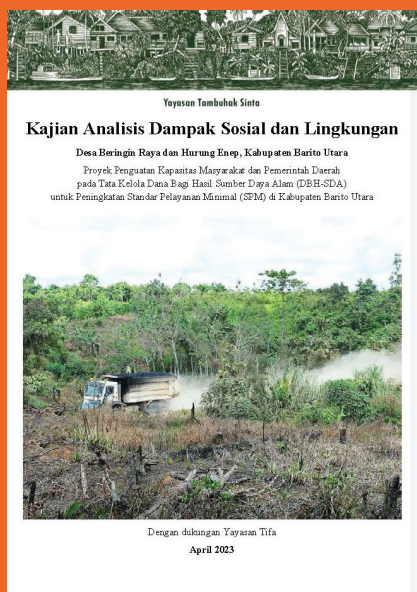
”



Etalase Pengetahuan

Etalase Pengetahuan merupakan publikasi dan produk komunikasi terpilih yang disusun oleh Tifa beserta mitra sepanjang tahun program 2023. Di antaranya berupa riset, modul, dan laporan terkait. Akses selengkapnya di tifafoundation.id





Jumlah Pengikut di Media Sosial

Per 14 Juni 2024.



5,100



8,445



3,370



1,630



3,066

Laporan Keuangan

Yayasan Tifa
Statements of Cash Flows
As of December 31, 2023

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar)

| | 2023 | | 2022 | |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | Rp | USD*) | Rp | USD*) |
| Cash flows from operating activities | | | | |
| Change in net assets | 14,342,568 | 951,584 | 3,821,522 | 257,393 |
| Add/(deduct) items not affecting the operating cash flows: | | | | |
| Depreciation | 1,074,349 | 70,500 | 1,051,715 | 70,837 |
| Unrealized foreign exchange gain | (374,730) | (24,308) | (3,490,946) | (235,128) |
| Changes in assets and liabilities: | | | | |
| Receivables from donors | 958,799 | 83,078 | (6,829,301) | (432,891) |
| Advances and prepayments | (575,426) | (38,091) | (246,406) | (13,441) |
| Deferred revenues | (2,673,645) | (156,820) | 8,505,180 | 512,754 |
| Payables to donors | (22,527,455) | (1,397,507) | 38,540,964 | 2,381,129 |
| Accruals and other liabilities | - | - | (240,850) | (18,399) |
| Compensation severance | 350,680 | 22,748 | - | - |
| Taxes payable | 34,942 | 2,385 | 56,144 | 3,344 |
| Net cash flows provided from (used in) operating activities | (9,389,918) | (516,431) | 41,168,022 | 2,525,598 |
| Cash flows from investing activity | | | | |
| Endowment fund | (15,631,939) | (1,014,008) | - | - |
| Purchases of fixed assets | (159,546) | (10,349) | (134,937) | (8,578) |
| Net cash flows used in investing activity | (15,791,485) | (1,024,357) | (134,937) | (8,578) |
| Net increase (decrease) in cash and banks for the year | (25,181,403) | (1,540,788) | 41,033,085 | 2,517,020 |
| Cash and banks at the beginning of the year | 60,493,208 | 3,845,478 | 15,969,177 | 1,119,151 |
| Effect of exchange rate changes on cash and banks | 374,730 | 24,308 | 3,490,946 | 235,128 |
| Foreign currency translation differences | - | (14,096) | - | (25,821) |
| Cash and banks at the end of the year | 35,686,535 | 2,314,902 | 60,493,208 | 3,845,478 |

*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 4 for the basis of translation

Jakarta, May 28, 2024


TIFA
 Oslan Purba
 Executive Director

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements

Yayasan Tifa
Statements of Financial Position
As of December 31, 2023

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar)

| | Notes | 2023 | | 2022 | |
|---|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Rp | USD*) | Rp | USD*) |
| Assets | | | | | |
| Current Assets | | | | | |
| Cash and banks | 3c,5 | 35,686,535 | 2,314,902 | 60,493,208 | 3,845,478 |
| Receivables from donors | 6 | 6,060,730 | 393,145 | 7,019,529 | 446,223 |
| Advances and prepayment | 7 | 1,163,047 | 75,445 | 587,616 | 37,354 |
| Endowment fund | 3i,8 | 15,631,939 | 1,014,008 | - | - |
| Total Current Assets | | 58,542,251 | 3,797,500 | 68,100,353 | 4,329,055 |
| Non-Current Assets | | | | | |
| Fixed assets | 3j,9 | 9,521,660 | 617,681 | 10,436,468 | 663,433 |
| Total Non-Current Assets | | 9,521,660 | 617,681 | 10,436,468 | 663,433 |
| Total Assets | | 68,063,911 | 4,415,181 | 78,536,821 | 4,992,488 |
| Liabilities | | | | | |
| Current Liabilities | | | | | |
| Grant payables | 3i,10 | 10,116,644 | 656,243 | 12,790,289 | 813,063 |
| Deferred revenues | 3i,11 | 26,587,577 | 1,724,674 | 49,115,032 | 3,122,181 |
| Accruals and other liabilities | 3i,12 | 233,428 | 15,142 | 233,428 | 14,839 |
| Compensation severance | 3p,13 | 350,680 | 22,748 | - | - |
| Taxes payable | 3o,14 | 125,704 | 8,155 | 90,762 | 5,770 |
| Total Current Liabilities | | 37,414,033 | 2,426,962 | 62,229,511 | 3,955,853 |
| Net Assets | | | | | |
| With restrictions from donor | 3m | 13,769,351 | 903,582 | (556,373) | (36,489) |
| Without restrictions from donor | 3m | 16,880,527 | 1,170,109 | 16,863,683 | 1,169,003 |
| Cumulative foreign currency translation differences | | - | (85,472) | - | (95,879) |
| Total Net Assets | | 30,649,878 | 1,988,219 | 16,307,310 | 1,036,635 |
| Total Liabilities and Net Assets | | 68,063,911 | 4,415,181 | 78,536,821 | 4,992,488 |

*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 4 for the basis of translation

Jakarta, May 28, 2024


TIFA
 Oslan Purba
 Executive Director

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements



Yayasan Tifa adalah organisasi yang mempromosikan terwujudnya masyarakat terbuka melalui kerja sama di isu-isu strategis dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Sejak berdiri, Tifa terus berupaya mendorong penguatan peran masyarakat sipil dalam perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan marjinal, perluasan hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat, advokasi bagi perwujudan media yang bebas, perbaikan tata kelola pemerintahan serta transparansi dan akuntabilitas dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik, serta sejumlah program lain yang selaras dengan upaya mewujudkan masyarakat terbuka di Indonesia.

Berkat kerja-kerjanya, Yayasan Tifa kini telah menjadi salah satu aktor dalam upaya mendorong terciptanya masyarakat terbuka, termasuk peningkatan kualitas demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.



Yayasan Tifa

18 Office Park Building 15th Fl. Unit C-D
Jl. TB Simatupang No. 18 , RT.2/RW.1, Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
Email: public@tifafoundation.id
Website: www.tifafoundation.id

-  Tifa Foundation
-  TifaFoundation
-  tifafoundation_id
-  Yayasan Tifa